

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



Saatnya Komoditi Tambang Subjek Kontrak Berjangka



Foto : Kepala Bappebti jadi narasumber di Kuliah Umum FEB UNPAD.

Berminatkah Anda menyandang gelar MMFT? Jika ya, maka tunggu datang kabar baiknya dari Magister Management Univeritas Padjajaran, Bandung. Karena dalam waktu tidak lama lagi, perguruan tinggi terkenal itu akan membuka kelas bisnis perdagangan berjangka komoditi.

Pesan di atas terkesan promosi, tetapi agaknya hal itu pantas disambut positif. Sebab ini kali pertama perguruan tinggi di dalam negeri yang menaruh perhatian serius untuk mengembangkan bidang studi perdagangan berjangka komoditi.

Wacana MM Unpad membuka kelas bisnis perdagangan berjangka komoditi itu terkuak saat Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, melakukan kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unpad, pada 28 April 2012, lalu. Hal itu dikatakan Ketua Program MM Unpad, Prof. Dr. Yuyus Suryana, SE, MS.

"Nantinya, gelar pascasarjana yang akan kami berikan yakni Magister Management Futures Trading (MMFT)," kata Yuyus Suryana.

Kehadiran Kepala Bappebti dan narasumber lain di kuliah umum itu, disambut antusias kalangan civitas FEB Unpad. Berbagai usulan muncul kepermukaan saat diskusi dilakukan. Usul yang direspon langsung Made Soekarwo, Dirut Jakarta Futures Exchange (JFX), adalah siap mendirikan pojok bursa berjangka di FEB Unpad.

Tidak hanya itu, JFX pun membuka lebar-lebar kesempatan bagi mahasiswa untuk menjadikan perdagangan berjangka sebagai subjek kajian penyusunan baik skripsi maupun tesis. Bahkan dijanjikan Made Soekarwo, "JFX akan memberi bea siswa bagi mahasiswa yang berminat menyusun

skripsi tentang perdagangan berjangka komoditi. Direksi JFX sudah mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk bea siswa tersebut."

Sementara itu, Kepala Bappebti Syahrul R. Sempurnajaya 'menantang' Unpad untuk merumuskan dan menyusun kurikulum di bidang perdagangan berjangka komoditi. Dikatakannya, bidang perdagangan berjangka komoditi merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu. "Silahkan Unpad menyusun kurikulum tersebut, agar menjadi salah satu disiplin ilmu yang baru dan bisa diikuti perguruan tinggi lainnya."

Pembaca budiman, penerbitan edisi kali ini Redaksi juga menyoroti rencana pemerintah untuk menghentikan ekspor komoditi tambang dalam bentuk bahan mentah pada tahun 2014. Dan sejak Mei 2012, ekspor komoditi tambang akan dikenakan Bea Keluar. Tentunya hal itu menjadi peluang bagi industri perdagangan berjangka nasional untuk menciptakan pasar di dalam negeri, melalui inovasi subjek kontrak berjangka komoditi tambang.

Indonesia sudah saatnya berbicara dikancah internasional dalam perdagangan komoditi tambang. Selama ini margin dari eksploitasi tambang tidak banyak dinikmati masyarakat Indonesia. Karena ekspor komoditi tambang belum melalui industri pengolahan di dalam negeri.

Jadi, inilah saatnya industri perdagangan berjangka komoditi nasional unjuk kemampuan mengembangkan kontrak berjangka komoditi tambang. Mampu 'kah?

Salam!

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE



Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggu- Jawab

Syahrul R. Sempurnajaya

Pemimpin Redaksi

Nizarli

Wakil Pemimpin Redaksi

Subagiyo

Dewan Redaksi

Pantas Lumban Batu, Agus
Muharni S., Harry Prihatmoko,
Diah Sandita Arisanti, Poppy
Juliyanti, Erni Artati, Sri
Haryati, Rizali Wahyuni

Sirkulasi

Apriliyanto, Katimin, Umar
Hasan.

Alamat Redaksi

Gedung Bappebti Jl. Kramat
Raya No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel
ataupun opini dikirim lengkap
dengan identitas serta foto ke
E-mail:
buletin@bappebti.go.id



Berita Utama.....4-7

- Saatnya Komoditi Tambang Subjek Kontrak Berjangka
- Perguruan Tinggi Pilar Industri PBK
- MM UNPAD Buka Kelas Bisnis PBK

Resi Gudang10-11

- Sukses SRG Ditentukan Sinergi Antar Lembaga
- Pemerintah Dorong Implementasi SRG Rotan

Pasar Lelang.....12-13

- Digitalisasi Pasar Lelang

Agenda Foto14-15

Aktualita.....16-17

- Bank Dunia 'Intip' PBK Indonesia
- ISI Fasilitas Serah Fisik OLEINTR 660 Ton
- SEF 'Janji' Transaksi Multilateral
- Dana Jaminan JFX Rp 300 Miliar

Analisa.....18

Info Harga.....19

Wawasan.....22-23

- UPP Kemendag Terbitkan Izin WPB & Sertifikat Pedagang

Kolom.....24-25

- Dilema Harga Minyak

Breaknews.....26

Berjangka.....8-9

Industri PBK Mampu Bersaing



Komoditi...20-21

Minyak Nabati Koprah



Kiprah...27

Dari Lawyer Jadi Broker





Saatnya Komoditi Tambang Subjek Kontrak Berjangka

Pemerintah akan menentukan Bea Keluar komoditi tambang agar industri hilir berkembang di dalam negeri. Ini saatnya bursa berjangka ciptakan subjek kontrak berjangka berbasis komoditi tambang.

Industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia harus sigap mengambil kesempatan mengembangkan subjek kontrak berjangka komoditi tambang. Dan ini saatnya bursa berjangka unjuk kemampuan menciptakan pasar komoditi tambang di dalam negeri. Dirilisnya kontrak berjangka komoditi tambang, bukan saja untuk meningkatkan likuiditas bursa terhadap kontrak berjangka multilateral. Tetapi juga, menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk menentukan berbagai kebijakan diindustri pertambangan nasional di masa mendatang.

Demikian antara lain diutarakan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul R. Sempurnajaya, saat menyampaikan arahan pada pelaksanaan penyegaran pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi di Surabaya, Jatim, 17 April 2012. "Dalam waktu dekat pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan akan mengeluarkan berbagai kebijakan terkait komoditi tambang sesuai amanat UU No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan

mineral dan batubara."

"Salah satu amanat dari undang-undang itu ditegaskan, bahwa selambat-lambatnya tahun 2014 ekspor komoditi tambang Indonesia dalam bentuk mentah akan dihentikan. Itu artinya ekspor komoditi tambang hanya bisa dilakukan setelah melalui proses pengolahan. Atau, barang setengah jadi," jelas Syahrul.

Oleh karena itu, sejak Mei 2012, nanti, tambah Syahrul, pemerintah secara bertahap akan mengatur mekanisme ekspor komoditi tambang hingga tahun 2014 sama sekali komoditi tambang tidak bisa di ekspor dalam bentuk mentah.

"Jadi menurut pemikiran kami, kondisi ini adalah peluang bagi bursa untuk menciptakan kontrak berjangka komoditi tambang. Dengan demikian, pasar komoditi tambang ada di dalam negeri dan dapat meningkatkan volume transaksi pelaku bursa untuk kontrak berjangka multilateral," tambah Syahrul.

Hal yang terpenting lagi, bahwa kita tidak selalu ketergantungan dengan bursa luar negeri untuk menetapkan berbagai kebijakan. "Sudah seharusnya

harga komoditi tambang itu tercipta di dalam negeri," kata Syahrul R. Sempurnajaya.

Nilai Tambah

Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Deddy Saleh, terkait hal itu dalam sebuah kesempatan mengatakan, pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memantapkan rencana pelarangan ekspor bahan mentah tambang tahun 2014.

"Kemendag akan menyiapkan aturan untuk ekspornya, sedangkan Kementerian ESDM mendorong industri tambang membuat smelter-smelter pengolahan," ujarnya.

Deddy Saleh, menegaskan, keputusan pelarangan tersebut sudah final. Jadi, jangan tawar-menawar dengan pemerintah untuk mengubah undang-undang.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan, untuk menjaga agar tidak over eksploitasi dan over produksi sehingga merusak lingkungan, pemerintah berencana menerapkan Bea Keluar komoditi pertambangan. Pemerintah



mengenakan Bea Keluar tersebut bukan dalam rangka mencari penerimaan negara. "Kebijakan Bea Keluar ini merupakan disinsentif bagi pengusaha yang selama ini lebih banyak mengekspor barang tambang mentah."

"Oleh karena itu pemerintah mendorong pengusaha tambang untuk mendirikan industri pengolahan. Pemerintah menghendaki hilirisasi komoditi pertambangan sesuai UU No. 4 Tahun 2009, agar terintegrasi antara industri hulu dan hilir di dalam negeri," kata Hatta.

Lebih jauh ditegaskan Hatta Radjasa, pemerintah ingin mendorong penciptaan nilai tambah dan berkembangnya pasar produk berbasis sumber daya alam di dalam negeri sehingga Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah. "Kebijakan yang sama sudah dijalankan industri kepala sawit, dua tahun terakhir ekspor CPO (crude palm oil) sudah dikenakan Bea Keluar. Maka saat ini industri hilir CPO mulai berkembang di dalam negeri."

Dalam catatan Deddy Saleh, komoditi tambang yang akan dikenakan Bea Keluar setidaknya ada sekitar 14 jenis komoditi. Masing-masing Tembaga, Emas, Perak, Timah, Timbal, Komium, Molybdenum, Platinum, Bauksit, Biji Besi, Pasir Besi, Nikel, Mangan dan Antimon.

Sedangkan besaran Bea Keluar yang akan dikenakan perhitungannya masih digodok pemerintah. Namun diperkirakan berkisar antara 15 % hingga 40 % dari nilai komoditi. "Bea Keluar itu bisa ditentukan berdasarkan harga pasar. Tetapi ada juga kemungkinan dipatok tanpa mempertimbangkan harga pasar," kata Deddy.

Harga Lokal

Dirut Jakarta Futures Exchange (JFX), Made Soekarwo, menanggapi kebijakan pemerintah tersebut kepada Buletin Kontrak Berjangka, mengatakan, JFX siap mendukung pemerintah. "Dari sisi bursa berjangka, kebijakan pemerintah tersebut merupakan potensi untuk mengembangkan kontrak berjangka komoditi tambang."

"Jika industri hilir komoditi tambang berkembang di dalam negeri, sudah barang tentu perlu instrumen perdagangan berjangka. Dengan instrumen ini, pelaku industri hilir bisa melakukan lindung nilai terhadap komoditi tambang. Dengan demikian ada jaminan suplai komoditi dan dapat

mengelola gejolak harga," papar Made.

Di pihak lain, Dirut Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BDKI), Megain Widjaja, menanggapi hal yang sama menyoroti dari sisi standardisasi komoditi pertambangan. Dikatakan Megain, memang saat ini masih banyak komoditi pertambangan belum memenuhi standar sesuai dengan SNI. "Sejatinya, ekspor produk pertambangan sesuai dengan SNI, sehingga tidak asal di ekspor tetapi terlebih dahulu melalui proses pengolahan."

"Di era perdagangan global saat ini standardisasi komoditi merupakan hal yang mutlak. Dengan demikian dunia usaha pun memiliki tolak ukur produk tambang jenis mana yang bisa di ekspor dan yang hanya bisa dikonsumsi di dalam negeri," tegas Megain.

"Jika sudah ada standardisasi, akan memudahkan bagi bursa berjangka untuk menciptakan kontrak berjangka komoditi tambang. Karena sesuai dengan aturannya, setiap kontrak berjangka harus berdasarkan standar SNI," terang Megain.

Terkiat dengan pengenaan Bea Keluar komoditi tambang yang akan diterapkan pemerintah pada Mei 2012, direksi dari dua bursa berjangka ini sama-sama setuju jika perhitungan Bea Keluar berdasarkan harga yang tercipta di bursa berjangka.

"Jika pemerintah mengenakan Bea Keluar komoditi pertambangan akan lebih representatif perhitungannya berdasarkan harga yang terjadi di bursa berjangka Indonesia. Karena produsen ada di dalam negeri," kata Made.

Megain Widjaja juga senada dengan Made, dikatakan seharusnya memang berdasarkan harga dari bursa berjangka di Indonesia. "Pasalnya, faktor fundamental komoditi tambang itu ada di dalam negeri."

"Perhitungan Bea Keluar produk pertambangan seharusnya mengacu dari harga bursa berjangka dalam negeri. Karena, faktor fundamentalnya ada di Indonesia dan kontrak yang diperdagangkan di bursa berjangka pasti sesuai SNI," urai Megain.

"Karena itu, kami sangat setuju jika



Kepala Beppebti mengunjungi pengolahan PT. Timah, Bangka.

pemerintah menetapkan Bea Keluar komoditi pertambangan dengan presentase yang tinggi. Tetapi jika ekspor komoditi pertambangan diperoleh dari transaksi bursa berjangka, maka tidak perlu dikenakan Bea Keluar. Karena transaksi lewat bursa sudah dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," papar Megain.

Menurut Megain Widjaja, dari sejumlah komoditi tambang yang dihasilkan Indonesia hanya komoditi timah yang sudah diperdagangkan melalui bursa berjangka. "BKDI memperdagangkan komoditi timah yang dikenal dengan INATIN. Perdagangan timah itu sudah diluncurkan pada 02 Februari 2012, lalu."

Megain Widjaja, menambahkan, penentuan Bea Keluar produk pertambangan ini relatif sama dengan Bea Keluar crude palm oil (CPO). Semula, perhitungan Bea Keluar CPO berdasarkan harga yang terjadi di bursa berjangka luar negeri. Tetapi sejak tahun 2011 lalu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sudah mengacu harga CPO dari BKDI.

Dengan mekanisme penentuan Bea Keluar berdasarkan bursa berjangka nasional, baik eksporti dan importir maupun pemerintah akan diuntungkan. Bagi eksportir ada jaminan harga dan bagi importir ada juga jaminan suplai komoditi. Demikian juga dengan pemerintah, dapat memantau perkembangan industri pertambangan di dalam negeri. Sehingga kebijakan yang diambil senantiasa mendukung berkembangnya industri.

Di samping itu, sudah saatnya Indonesia menciptakan pasar komoditi khususnya komoditi pertambangan di dalam negeri. Sehingga pelaku pasar global dapat mengacu dan bertransaksi melalui bursa berjangka Indonesia. ▲



Perguruan Tinggi Pilar Industri PBK

Perguruan tinggi memiliki peran penting menjembatani masyarakat dengan industri perdagangan berjangka komoditi. Di sisi lain, perguruan tinggi merupakan episentrum terciptanya SDM handal dan profesional.

Industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia seharusnya sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan usianya yang mencapai sebelas tahun. Untuk mengentot volume transaksi sehingga likuiditas bursa lebih tinggi, perlu dipikirkan kontrak berjangka komoditi ritel. Namun harus dibarengi dengan edukasi dan sosialisasi yang merata. Sehingga masyarakat memahami instrumen perdagangan berjangka komoditi merupakan salah satu sarana investasi yang *high risk high return*.

Demikian antara lain diutarakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjajaran, Bandung, Dr. Nury Effendi, SE., MA, kepada Buletin

Kontrak Berjangka di ruang kerjanya, 27 April 2012.

“Tanpa membandingkan dengan apa yang dilakukan bursa saham, industri perdagangan berjangka juga perlu bersinergi dengan perguruan tinggi. Selain edukasi, industri ini juga bisa menjadi salah satu subjek kajian kalangan akademika,” jelas Nury Effendi.

Menurut Nury Effendi, perguruan tinggi juga bisa menjadi jembatan penghubung antara masyarakat awam dengan industri perdagangan berjangka komoditi. “Saat ini masih kental stigma di tengah masyarakat bahwa industri ini lebih besar unsur spekulasinya. Sehingga untuk kalangan tertentu dianggap tidak bermanfaat dan bertentangan dengan kaidah-kaidah agama.”

“Mensiasati hal itu, bursa berjangka perlu mengkaji dan mengembangkan kontrak berjangka komoditi syariah. Industri perdagangan berjangka pun bisa belajar dari pengalaman perbankan dan juga bursa saham yang mengeluarkan produk-produk syariah. Terbukti produk-produk syariah itu diminati masyarakat,” katanya.

Lebih jauh dikatakan Nury Effendi, untuk mengundang minat mahasiswa mendalami instrumen perdagangan berjangka, bursa pun perlu mendirikan gerai di kampus-kampus. “Gerai tersebut sebagai etalase bagi mahasiswa untuk memahami mekanisme perdagangan berjangka. Di sisi lain, melalui gerai

bursa berjangka tersebut mahasiswa dapat melakukan simulasi perdagangan berjangka. Sehingga ketika mahasiswa tersebut meninggalkan kampus, sudah memiliki gambaran untuk mengisi lapangan pekerjaan yang tersedia pada industri perdagangan berjangka komoditi,” papar Nury Effendi.

Kurikulum PBK

Senada dengan itu, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul R. Sempurnajaya, mengatakan, di masa mendatang salah satu penggerak industri perdagangan berjangka komoditi nasional adalah dunia kampus. Oleh karena itu Syahrul berharap, perguruan tinggi pun terutamanya Unpad, bisa berperan mengembangkan industri ini melalui kajian-kajiannya dan menciptakan SDM yang handal di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Hal itu diutarakan Syahrul R. Sempurnajaya, saat memberi Kuliah Umum tentang perdagangan berjangka komoditi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univ. Padjajaran, 28 April 2012. Narasumber lain pada Kuliah Umum yang diikuti sekitar 150 mahasiswa Unpad, itu, yakni Dirut PT Jakarta Futures Exchange (JFX), Made Soekarwo, Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Surdiyanto Suryodarmodjo, Ketua Asosiasi Perusahaan Pialang Berjangka Indonesia (APBI), I Gede Raka



Dekan FEB UNPAD, Dr. Nury Effendi, SE., MA



“di masa mendatang salah satu penggerak industri perdagangan berjangka komoditi nasional adalah dunia kampus.”

Tantra. Sedangkan moderator pada Kuliah Umum tersebut yaitu Dosen Fak. Ekonomi, Rachmat Sudarsono.

“Perguruan tinggi harus mengambil posisi sebagai salah satu pilar pengembangan industri perdagangan berjangka komoditi di dalam negeri, melalui program-program kajian dan penelitian. Dengan kata lain, industri perdagangan berjangka komoditi bisa dijadikan subjek penyusunan skripsi dan thesis,” kata Syahrul.

Di sisi lain Syahrul R. Sempurnajaya, berharap, perguruan tinggi khususnya Unpad perlu mengembangkan kurikulum di bidang perdagangan berjangka komoditi.

“Industri ini memang spesifik. Tetapi di sini gudangnya dari berbagai disiplin ilmu. Mekanisme perdagangan berjangka komoditi itu baru satu sisi. Di

sisi lain, masih banyak yang harus dipelajari dan pahami untuk bisa memasuki bisnis ini. Seperti aspek produksi komoditi, hukum demand dan suplai, iklim dan cuaca, legalitas dan aspek lainnya,” papar Syahrul.

“Kami pun sangat berharap Unpad bisa melakukan kajian-kajian terhadap kontrak berjangka komoditi yang bisa diperdagangkan oleh bursa. Di beberapa negara maju, kontrak berjangka komoditi tidak semata komoditi fisik seperti komoditi pertanian dan pertambangan. Tetapi juga komoditi yang tidak kelihatan kasat mata. Seperti kontrak berjangka iklim dan juga emisi karbon,” tandas Syahrul R. Sempurnajaya.

Bea Siswa

Sementara itu, Dirut JFX, Made Soekarwo, mengatakan, pihaknya terbuka bagi perguruan tinggi untuk menjalin kerjasama, misalnya mendirikan gerai bursa berjangka komoditi. “Langkah itu sudah kami lakukan dengan sejumlah perguruan tinggi nasional. Kalau Unpad bersedia mendirikan gerai bursa berjangka komoditi, kami akan mendukung dan menyediakan fasilitas yang bisa memantau aktivitas perdagangan bursa melalui

teknologi informasi.”

“Di samping itu, JFX pun akan menunjuk salah satu perusahaan pialang berjangka yang memiliki cabang di Bandung untuk memberi edukasi tentang perdagangan berjangka bagi mahasiswa,” kata Made.

Dalam kesempatan itu, Made Soekarwo juga mengundang mahasiswa Unpad yang berminat untuk penyusunan skripsi tentang perdagangan berjangka komoditi.

“Setiap tahun manajemen JFX mengalokasikan anggaran bea siswa bagi mahasiswa yang berminat menyusun skripsi tentang perdagangan berjangka komoditi. Jadi, silahkan mahasiswa Unpad mengajukan proposal penyusunan skripsi dan kami pun akan mendukung dan membimbingnya,” urai Made Soekarwo.

Kami sangat menyadari bahwa industri perdagangan berjangka komoditi tidak akan bisa maju dan berkembang tanpa dukungan pihak-pihak lain termasuk perguruan tinggi, tambah Made Soekarwo. Oleh karena itu, jajaran Direksi JFX saat ini berkomitmen dengan motivasi tumbuh bersama *spirit of growing together*. ▲

MM Unpad Buka Kelas PBK



Ketua Program Magister Management, Unpad, Prof. Dr. Yuyus Suryana, SE, MS., disela-sela menerima kunjungan Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, dan nara-

sumber lain pada Kuliah Umum perdagangan berjangka komoditi, mengungkapkan dalam waktu dekat MM Unpad akan membuka kelas khusus di bidang perdagangan berjangka komoditi.

“Paradigma perguruan tinggi saat ini sudah berubah. Perguruan tinggi harus ‘menjemput bola’ apa yang dibutuhkan industri, terutamanya industri perdagangan berjangka komoditi,” kata Yuyus Suryana.

Perkembangan perekonomian global saat ini mendesak industri harus bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk menciptakan SDM yang handal di bidangnya. Oleh karena itu, kami dalam waktu dekat akan membuka kelas Magister Management di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Menurut Yuyus, menciptakan SDM yang handal harus bisa disinergikan ‘ABG’ yakni *academica, business and government*. “Terkadang, ‘ABG’ pun tidak cukup mengantisipasi perkem-

bangsan industri. Perlu juga ditambah ‘ABCG’ yakni *academica, business, community and government*. *Community* belakangan ini pun sangat mempengaruhi perkembangan industri. Misalnya, asosiasi, komunitas masyarakat, komunitas zona ekonomi hingga ke partai.

“Diharapkan tahun ajaran baru 2012-2013, nanti, kelas Magister Management Perdagangan Berjangka Komoditi, Unpad, sudah terbuka bagi masyarakat,” kata Yuyus, optimis.

Langkah pertama MM Unpad mendirikan kelas tersebut, diawali dengan program seminar tentang perdagangan berjangka komoditi. Hal itu untuk mengkaji minat masyarakat dan industri.

“Kelak lulusan Magister Management di bidang perdagangan berjangka komoditi itu bergelar MMFT (Magister Management Futures Trading),” imbuh Yuyus Suryana. ▲



Industri PBK Mampu Bersaing

Industri perdagangan berjangka nasional punya kemampuan bersaing dengan bursa berjangka asing. Karena Indonesia memiliki komoditi yang diperdagangkan bursa berjangka asing.

Spirit *fo Growing Together*. Kalimat itu dikampanyekan untuk mendongkrak volume transaksi anggota Jakarta Futures Exchange (JFX), khususnya kontrak berjangka multilateral. Selain itu, secara bersama-sama menjadikan bursa berjangka sebagai sarana penciptaan dan referensi harga dari sejumlah komoditi primer Indonesia. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul R. Sempurnajaya, mengatakan, industri perdagangan berjangka nasional punya kemampuan bersaing dengan bursa berjangka luar negeri. Karena Indonesia memiliki komoditi yang diperdagangkan bursa berjangka luar negeri.

“Harusnya kita mampu bersaing dan lebih maju dibandingkan dengan bursa berjangka luar negeri itu. Karena apa? Basis komoditinya ada di Indonesia. Sehingga, seharusnya harga di Indonesia itu lebih relevan dibandingkan dengan bursa luar negeri. Harga yang terjadi di bursa berjangka luar negeri itu sudah banyak dipengaruhi para spekulan,” demikian antara lain dikatakan Syahrul R. Sempurnajaya, saat memberi sambutan Member Gathering JFX dan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), di Kuala Lumpur, Malaysia, 12 April 2012.

Member Gathering JFX dan KBI di Kuala Lumpur, Malaysia, itu, berlangsung dari tanggal 12 hingga 14 April 2012. Kegiatan ini dihadiri seluruh perusahaan pialang berjangka dan perusahaan pedagang berjangka, serta sejumlah pejabat Bappebti. Selain itu, Asosiasi Perusahaan Pialang Berjangka Indonesia (APBI), Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI), Komisaris dan Direksi dari JFX dan KBI.

Lebih jauh dipaparkan Syahrul R. Sempurnajaya, bursa berjangka luar negeri bisa lebih maju karena mereka sudah lebih dahulu memperdagangkan kontrak berjangka komoditi. Dan mereka mampu menciptakan pasar yang likuid. Tetapi pada dasarnya, mereka tetap mengacu dengan kondisi pasar Indonesia. “Inilah yang harus kita pelajari. Bagaimana caranya agar kontrak komoditi yang ada di JFX bisa likuid.”

“Oleh karena itu, dalam jangka menengah saya akan menempatkan Staf Bappebti di beberapa bursa luar negeri, untuk mengamati dan mempelajari apa yang mereka lakukan sehingga komoditi primer begitu likuid diperdagangkan bursa berjangka,” ujar Syahrul.

Seperti di LIFFE, Inggris, di sana tidak ada pohon kopi. Tetapi harga kopi yang ada di dalam negeri mengacu ke sana. Demikian juga dengan bursa ber-

jangka Tokyo, Jepang, di sana tidak ada pohon karet tetapi harga karet dunia ditentukan oleh bursa Jepang, tambahnya.

Selain itu, kata Syahrul, upaya meningkatkan volume transaksi kontrak multilateral, Bappebti akan tegas menerapkan sanksi bagi perusahaan pialang berjangka yang tidak memenuhi ketentuan transaksi multilateral minimum 5 %. Ketentuan itu diatur sesuai Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 69/Bappebti/Per/6/2009.

“Dalam kesempatan ini saya mau tegaskan, perusahaan pialang harus lebih kerja keras lagi meningkatkan transaksi multilateral kalau tidak mau kena sanksi. Bappebti selalu siap membantu baik bursa maupun perusahaan pialang untuk melakukan edukasi atau sosialisasi,” papar Syahrul R. Sempurnajaya.

Rangkul Sekuritas

Dirut JFX, Made Soekarwo, di sisi lain mengatakan, apa yang diraih saat ini memang masih jauh dari yang diharapkan. “Tetapi, kami manajemen JFX senantiasa berupaya agar likuiditas bursa khususnya pada transaksi kontrak multilateral dapat meningkat.”

“JFX berupaya mendorong pertumbuhan volume total transaksi tahun ini, diharapkan dua kali lipat dibandingkan total tahun 2011 lalu,” kata Made. Lebih



jauh dikatakan Made Soekarwo, total transaksi tahun 2011 mencapai 7,5 juta lot atau mengalami peningkatan sekitar 39 % dari tahun 2010. Sementara itu, transaksi kontrak multilateral mencapai 15.000 lot, naik 395 % dibandingkan tahun 2010. “Memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Ini sesuatu yang sangat menggembirakan, tapi masih jauh dari yang diharapkan,” terang Made.

“Satu upaya untuk menggenjot peningkatan transaksi multilateral adalah menambah kontrak komoditi yang menarik untuk diperdagangkan. Seperti, kontrak berjangka komoditi kakao juga mulai diperkenalkan komoditas karet

dan batubara untuk menarik minat pasar,” katanya.

Selain itu, tambah Made, merangkul perusahaan pialang baru untuk masuk JFX. “Saat ini ada sebanyak 68 perusahaan pialang berjangka, tetapi yang aktif beroperasi hanya sebanyak 58 perusahaan.

“Kami sudah memikirkan menjaring perusahaan pialang baru, misalnya menggandeng perusahaan sekuritas untuk membuka anak usaha perusahaan pialang berjangka. Dengan demikian promosi kontrak berjangka komoditi diperdagangkan bursa semakin luas,” tandas Made Soekarwo. ▲



Pialang Terbaik JFX 2011

Upaya menggenjot volume transaksi perusahaan pialang berjangka, JFX memberi penghargaan bagi perusahaan yang mencatatkan volume transaksi terbesar selama tahun 2011. Penghargaan itu dikelompokkan dalam tiga kategori, pertama, perusahaan pialang yang memenuhi persyaratan sesuai Surat Keputusan Kepala Bappebti, No. 69/Bappebti/Per/6/2009, tentang transaksi multilateral minimal 5 %. Kedua, perusahaan pialang dengan volume terbesar transaksi kontrak multilateral. Dan, ketiga, kategori perusahaan pialang dengan volume terbesar transaksi kontrak bilateral.

Penyerahan penghargaan untuk kategori pertama dilakukan Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya. Untuk kategori perusahaan pialang terbesar volume transaksi multilateral penghargaan disampaikan Dirut JFX, Made Soekarwo. Sedangkan bagi perusahaan pialang untuk volume transaksi terbesar kontrak bilateral diberikan Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo. Penyerahan penghargaan itu dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, 12 April 2012. ▲



Perusahaan Pialang Memenuhi Persyaratan SK No : 69/Bappebti/Per/6/2009		
1.	PT MAXCO FUTURES	Pencapaian 8 kali
2.	PT GLOBAL ARTHA FUTURES	Pencapaian 8 kali
3.	PT GATRA MEGA BERJANGKA	Pencapaian 8 kali
Perusahaan Pialang Terbesar Volume Transaksi Multilateral 2011		
1.	PT JALATAMA ARTHA BERJANGKA	7.222 lot
2.	PT SOEGEE FUTURES	6.188 lot
3.	PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES	6.062 lot
Perusahaan Pialang Terbesar Volume Transaksi Bilateral 2011 :		
1.	PT MONEX INVESTINDO FUTURES	1.054.036 lot
2.	PT SOLID GOLD BERJANGKA	696.073 lot
3.	PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA	649.817 lot



Sukses SRG Ditentukan Sinergi Antar Lembaga

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi kemudahan bagi UKM dan kelompok tani memanfaatkan SRG sebagai instrumen pembiayaan perdagangan.

Pemerintah Daerah punya peranan penting dalam implementasi sistem resi gudang (SRG), sebagaimana diatur pasal 33, UU No. 9/2011, tentang Perubahan Atas UU No. 9/2006, tentang Sistem Resi Gudang. Pada pasal itu diuraikan peran Pemda mencakup pembuatan kebijakan daerah untuk mempercepat pelaksanaan SRG, pengembangan komoditas unggulan daerah, penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan SRG dan memfasilitasi pengembangan Pasar Lelang Komoditas.

"Implementasi SRG di daerah tidak akan terwujud tanpa adanya sinergi dan integrasi dari berbagai lembaga terkait," demikian antara lain dipaparkan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul R. Sem-purnajaya, pada sosialisasi SRG di Kab. Lamongan, Jatim, 19 April 2012. Hadir pada sosialisasi itu antara lain Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kab. Lamongan, pejabat Pemda dan BUMN, pimpinan Bank Jatim, pimpinan PT. Pertani (Persero) dan petani- Kelompok Tani Kab. Lamongan.

"Selain sinergi antar lembaga terkait, Pemerintah Pusat dan Pemda sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan kemudahan bagi UKM dan

kelompok tani. Karena, SRG sesuai undang-undang merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan para petani, kelompok tani, Gapoktan, koperasi tani maupun pelaku usaha sebagai suatu instrumen pembiayaan perdagangan," jelasnya.

SRG memiliki manfaat yang jauh lebih luas baik terhadap petani maupun dunia usaha. Dan bagi pemerintah, SRG bisa mengendalikan harga, efisiensi logistik dan distribusi komoditi pangan," tambah Syahrul.

"Kabupaten Lamongan memiliki sejumlah komoditi yang dapat diresi gudangkan. Seperti komoditi padi dan jagung, berdasarkan data tahun 2009 yang kami peroleh, produksi padi mencapai 838.987 ton dan komoditi jagung sekitar 318.813 ton. Dari produksi sebesar itu, ada surplus padi sekitar 291,348 ton dan jagung sekitar 96.657 ton. Kondisi surplus itu menunjukkan adanya peluang bagi petani untuk dapat secara optimal memanfaatkan skema SRG," jabar Syahrul.

Pembangunan Gudang

Tahun 2011, melalui DAK-Bappebti, bekerjasama dengan Pemda dari 14 kabupaten membangun 14 gudang flat. "Salah satunya di Kab. Lamongan yang berlokasi di Jalan Raya Mantup, Desa Bakalanpule, Keca-

matan Tikung," papar Syahrul R. Sem-purnajaya.

Dan, guna lebih memperluas pelaksanaan SRG di daerah sentra produksi, tambahnya, melalui dana DAK tahun 2012, Bappebti bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sedang membangun gudang sebanyak 14 gudang flat di 14 kabupaten pada 11 provinsi dengan total kapasitas 21.000 Ton.

Selain pembangunan gudang, Bappebti juga terus melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi bagi para petani dan pelaku usaha secara berkesinambungan, pemberian bimbingan teknis bagi pelaku usaha, pengembangan Sistem Informasi Harga, mendorong kemitraan antara pengelola gudang besar (BUMN) dengan koperasi/UKM, dan peningkatan kerjasama bantuan teknis dengan lembaga internasional seperti IFC-World Bank, serta peningkatan SDM internal Bappebti.

Meringankan beban petani, kelompok tani, Gapoktan dan koperasi dalam pemanfaatan SRG, pemerintah telah meluncurkan program subsidi bunga bank sebesar 6 %. Subsidi bunga itu disalurkan melalui bank pelaksana yang ditunjuk Menteri Keuangan. Hingga saat ini ada lima bank penyalur Skema Subsidi Resi Gudang, yaitu Bank Kalsel, Bank BJB (Bank Jabar Banten), Bank Jateng, Bank Jatim dan Bank Rakyat Indonesia. ▲



Meningkatkan nilai tambah komoditi rotan pemerintah larang ekspor rotan mentah. Untuk meminimalisir dampak dari pelarangan tersebut, pemerintah keluaran kebijakan memasukan rotan ke dalam skema sistem resi gudang (SRG).

Implementasi SRG komoditi rotan masih terkendala karena belum adanya kejelasan tentang spesifikasi dan standarisasi mutu bahan baku rotan. “Di Barito Timur sudah ada gudang rotan dan pengelolanya, tapi sampai sekarang masih menunggu kesepakatan antara Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) dan Asosiasi Pengumpul Rotan (ASPERO),” kata Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, 20 April 2012.

Ismadjaja mengatakan, nota kesepahaman (MoU) antara AMKRI sebagai penyerap bahan baku rotan dengan ASPERO sebagai pemasoknya, sudah terjalin pada Desember 2011. Namun, AMKRI belum memberikan rincian spesifikasi bahan baku rotan yang harus dipasok Aspero kepada AMKRI. “Kita masih menunggu dari AMKRI dan ASPERO, kalau mereka sudah sepakat dengan kualitasnya, tinggal kita mempersiapkan resi gudangnya,” jelas Ismadjaja.

Komoditi yang masuk dalam kategori SRG, kata Ismadjaja, harus memiliki lima persyaratan. Diantaranya, komoditas itu tahan lama minimal bisa disimpan dalam waktu tiga bulan, harganya berfluktuasi yaitu saat panen harga turun sedangkan saat paceklik harga naik, memiliki standar mutu sesuai Standar Nasional Indonesia, memiliki informasi harga yang pasti, dan komoditasnya strategis baik di dalam negeri maupun ekspor.

Saat ini, sudah ada SNI untuk rotan asalan dan SNI rotan setengah jadi seperti rotan poles dan kulit. Tapi, kata Ismadjaja, setelah melihat fakta di lapangan, untuk beberapa syarat memang masuk, tapi untuk standar mutunya harus dibuat terlebih dahulu. “Karena ketika petani menebang rotan, tidak bisa langsung masuk ke gudang dan mendapatkan pembiayaan. Jadi harus diolah dahulu setelah sesuai standar SNI, baru bisa masuk ke gudang,” ujarnya.

Menurut Ismadjaja, SRG akan menguntungkan petani dan pengumpul rotan karena resi dapat menjadi agunan untuk memperoleh pinjaman dari bank. Rencananya, pemerintah akan membentuk kelembagaan, yaitu semacam koperasi di daerah. “Nantinya, koperasi itu bertindak sebagai pedagang pengumpulnya, dan membiayai petani. Saat rotan standar kualitasnya sudah pasti baru bisa diresi gudangkan,” terang Ismadjaja.

Saat ini, gudang rotan yang sudah memenuhi standar hanya di Barito Timur, Kalteng. Sedangkan gudang-gudang lainnya masih bersifat sederhana yang hanya sebagai tempat penyimpanan sementara.

Tim Rotan

Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia. Produksi komoditi rotan tidak hanya diperoleh dari hutan, tapi, di beberapa tempat telah berhasil dibudidayakan, seperti di Aceh, Kalbar, Kalsel, dan lainnya. Untuk jenisnya sangat beragam,

diperkirakan lebih dari 100 jenis, sehingga mutu dan harga rotan juga sangat bervariasi. Untuk itu, perlu proses dalam pemilahan komoditi rotan dalam implementasi SRG komoditi ini.

Dalam rantai distribusi rotan, petani atau pembudidaya rotan sebagai penebang, biasanya tidak melakukan penyimpanan dan langsung menjual rotan kepada ke pengumpul. Pengumpul inilah yang biasanya menyimpan rotan sebelum berlanjut ke pengepul besar. Selanjutnya dilakukan perdagangan antar pulau untuk masuk industri pengolahan rotan. Oleh karena itu, dengan skema yang ada sekarang, SRG nampaknya belum dapat dimanfaatkan secara langsung oleh petani rotan.

Kebijakan SRG rotan sebenarnya tidak bertujuan untuk menunggu kenaikan harga, karena harga komoditi rotan relatif stabil dan tidak berfluktuasi. Kebijakan tersebut dimanfaatkan sebagai pembiayaan perdagangan (trade financing), dimana pembiayaan yang diperoleh dari lembaga keuangan dapat dijadikan modal untuk menambah cash flow.

Untuk mempercepat implementasi SRG rotan, rencananya pemerintah akan membentuk sebuah tim kecil yang akan beranggotakan dari Bappebti, Kemenhut, BSN, Kemenprin, PPMB, AMKRI. Tim ini, nantinya akan bertugas membuat matriks pelaksanaan SRG komoditi rotan, SNI uji mutu dan gudang yang akan digunakan untuk pelaksanaan SRG rotan. ▲



Digitalisasi Pasar Lelang

Perdagangan komoditi yang dilelang secara on-line mulai dilirik banyak pihak.

Teknologi informasi, semakin memudahkan penjualan dengan pembeli tanpa dibatasi ruang dan jarak. Dengan duduk manis di belakang meja, perputaran uang dan barang serta transaksi dapat mudah dilakukan. Selain itu, pasar lelang komoditi secara on-line menciptakan mekanisme pembentuk harga yang wajar dan transparan, serta efektif dalam mengefisienkan mata rantai perdagangan.

Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan masing-masing daerah, memiliki karakteristik produk komoditi yang dihasilkan sangat beragam. Tentunya diperlukan informasi yang cepat, tepat dan akurat sebagai efisiensi produksi dan daya saing bagi komoditi unggulan setiap daerah di pasar nasional bahkan internasional.

Untuk itu, dalam memperlancar dan meningkatkan akses para petani terhadap informasi pasar, efisiensi, daya saing dan posisi tawar menawar baik di pasar domestik maupun internasional, maka perlu adanya sistem informasi

pasar lelang komoditi secara on-line. Pasar lelang ini juga dapat dikatakan sebagai institusi pelayanan pemasaran yang berfungsi sebagai tempat transaksi dan pusat distribusi komoditi serta sebagai pusat informasi pasar,

Untuk itu, dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perdagangan, maka perlu adanya sistem informasi pasar lelang komoditi secara on-line. Pasar ini dimaksudkan menciptakan sistem perdagangan yang baik, melalui mekanisme penentuan harga yang transparan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perdagangan, mencukupi kebutuhan antar daerah, serta menciptakan insentif bagi peningkatan mutu produk. Dapat dikatakan, pasar lelang sebagai institusi pelayanan pemasaran yang menjadi pusat informasi pasar.

Memang bukan hal yang baru, kegiatan perdagangan komoditi agro yang dilakukan dengan sistem lelang itu telah dikembangkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sejak tahun 2003. Dalam pelaksanaannya, pasar lelang terdiri dari dua bentuk, yaitu pasar lelang forward dan pasar lelang spot. Peluncuran program Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA) oleh Bappebti ternyata mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari bertambahnya pendirian PLKA, meningkatnya kualitas penyelenggaraan, jenis komoditi yang ditawarkan semakin beragam dan bertambahnya frekuensi pelaksanaan pasar lelang.

Pasar Lelang Komoditi Beras

Adalah Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas) Indonesia, merupakan sebuah group perusahaan swasta yang

bergerak di bidang pengembangan jaringan pasar induk. Group perusahaan yang berkantor Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang ini, mencoba keberuntungan dengan membuat pasar lelang spot Oktober 2011 lalu.

Alasannya, Paskomnas yang mulai melakukan kegiatan pengembangan pasar induk sejak awal tahun 2000 lalu, merasa perlu untuk memfasilitasi produsen beras dengan pemasaran yang lebih luas, dan pemasaran tidak bersifat lokal.

“Walaupun daerah kita daerah subur, tapi tidak semuanya memproduksi beras, ada daerah penghasil beras, adapula yang tidak. Jadi apabila mereka mencari beras tidak perlu jauh-jauh mencari di daerah penghasil beras, mereka cukup ke kita. Ada beras Jawa Barat, Jawa Tengah, pastinya dengan ragam merek,” jelas Management Advisor Paskomnas I Putu Y Herawanta.

Putu menjelaskan, Paskomnas memiliki tiga bagian untuk mengetahui proses transaksi yang ditampilkan di layar monitor di kantornya. “Yaitu penawaran jual, penawaran beli, transaksi hari ini, dan proses tersebut juga dapat dilihat di website kami,” katanya.

Saat ini, Paskomnas memiliki empat pasar induk, antara lain Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang, Pasar Induk Jaka Baring Palembang, Pasar Induk Beras Tangerang, dan Pasar Induk Osowilangun Surabaya. Tapi, untuk pasar lelangnya yang beroperasi, hanya di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang. “Untuk pasar induk lainnya, lahannya sudah ada, tunggu di sini berjalan dengan baik, baru kita copy paste saja,” ungkapnya.

Menurutnya, Paskomnas memiliki 16 gudang dengan kapasitas 150 ton per gudang. Untuk transaksinya memang belum berjalan maksimal, rata-rata terjual 100 lot dalam sehari atau 10 ton.

“Paskomnas pernah ditunjuk langsung oleh Bulog, untuk menjadi peny-



Management Advisor Paskomnas I Putu Y Herawanta.



“pasar lelang dengan on-line sangat baik untuk menciptakan perdagangan antar daerah dan pulau, dan orang tidak akan berpikir lagi untuk mempermainkan harga.”



elenggara pasar beras murah. Biasanya transaksi ramai kalau ada operasi pasar, karena harganya murah. Pembeli dari Jakarta, Serang, Tangerang, dan lainnya, mencari beras ke kita, sampai stok gudang hampir 2000 ton,” katanya.

Putu mengakui bahwa di wilayah Tangerang, pedagang besar berasnya cukup kuat. Sedangkan harga jual relatif sama dengan harga pasaran, karena Paskomnas tidak bisa menentukan harga. “Hargakan ditentukan oleh penjual. Idealnya, Paskomnas menjembatani perdagangan antar daerah, tapi kalau untuk lokal di Tangerang, kita tidak mungkin bersaing, kita bermain dengan transparansi harga,” jelasnya.

Untuk mekanisme pasar lelang di Paskomnas, Putu menjelaskan, penjual dan pembeli harus daftar terlebih dahulu untuk dapat melakukan transaksi. Selanjutnya anggota akan mendapatkan User id berikut passwordnya.

“Anggota penjual wajib menyerahkan komoditi yang akan dijualnya ke gudang Paskomnas, sedangkan anggota pembeli wajib menyetorkan uang muka minimal sebesar 10% dari harga komoditi yang akan ditransaksikannya ke rekening yang telah ditentukan oleh Paskomnas, kalau terjadi gagal bayar, maka pembayaran tersebut akan dieksekusi oleh lawan transaksinya,” jelasnya.

Pelunasan transaksi oleh pembeli harus dilakukan paling lambat jam 15:00 WIB pada satu hari setelah transaksi, sedangkan penyerahan komoditi dilakukan pada 1 s/d 7 hari setelah transaksi. “Selama ini, tidak ada gagal serah, karena barangnya kan ada di kita,” ujarnya.

Sementara ini, penggunaan gudang Paskomnas tanpa dipungut biaya,

dan barang yang sudah ada di gudang, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Paskomnas. “Paskomnas mendapatkan 0,6 persen dari penjual dan pembeli saat melakukan transaksi,” bebernya.

Dalam memperkenalkan sistem transaksi on-line ini, Paskomnas mengadakan berbagai cara untuk berpromosi, diantaranya pertemuan dengan pedagang-pedagang lokal, menyebarkan brosur, dan bekerjasama dengan instansi terkait di beberapa kementerian.

Menyinggung masalah Sistem Resi Gudang (SRG), Paskomnas sudah mendapat izin dan telah bekerjasama dengan PT. Pertani dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Tapi, sampai saat ini belum ada penitipan di gudangnya. “Baru bulan kemarin SRG nya, kita menunggu Gapoktan, kalau untuk pedagang kan tidak mendapat subsidi bunga,” jelasnya.

Lantas sejauh mana progres pertumbuhan pasar lelang Paskomnas? Putu mengatakan, sementara ini belum ada perencanaan untuk komoditi lain, Paskomnas masih dengan komoditi berasnya. “Kita optimis, di luar negeri saja jalan, masa di negara kita tidak,” tegasnya.

iPasar

Tak jauh berbeda dengan Paskomnas, iPasar terlebih dahulu eksis sebagai pasar lelang komoditi. Perbedaannya, jika Paskomnas komoditinya hanya beras, justru iPasar tidak ada komoditi tersebut. “Rencana beras juga akan kita perdagangkan, tapi untuk saat ini belum,” jelas Dean Novel, Direktur Operasional PT iPasar Indonesia.

Selain itu, iPasar juga melaksanakan pasar lelang forward dan pasar le-

lang spot. Di samping itu, ada juga perdagangan negosiasi, jadi kalau spot dan forward kami yang menetapkan mutu, sedangkan untuk negosiasi lebih luwes, bebas,” ujarnya.

Untuk komoditas yang diperdagangkan yaitu, jagung pipilan, rumput laut, kayu jati Perhutani, gondorukem dan terpin, yang terbaru kopi arabica gado dari Aceh.

Novel menjelaskan, iPasar telah menjalin kerjasama dengan instansi terkait di beberapa kementerian dan Pemerintah daerah. “Dengan kerjasama itu, pemerintah daerah menyediakan gudang-gudang di daerah sebagai gudang serah,” katanya.

Untuk perkembangan nilai transaksi, peningkatan komoditi kayu dan jagung cukup luar biasa. Dibandingkan tahun lalu, tahun berjalan sekarang kenaikannya hampir 100 %. “Selain itu, rumput laut juga cukup naik, dan kayu jati nilai transaksinya dalam 3 bulan terakhir sebesar Rp 8,7 miliar.”

Untuk SRG, iPasar sudah memiliki gudang di Lombok Timur. Resinya sudah bisa di BRI, sedang diusahakan di Gudang lain dan berintegrasi menjadi SRG.

Menurut Novel, perkembangan dari pasar lelang dengan on-line sangat baik untuk menciptakan perdagangan antar daerah dan pulau, dan orang tidak akan berpikir lagi untuk mempermainkan harga. “Tiga tahun lalu, model seperti ini, masih fenomenal, tapi tahun kemarin dan tahun ini, banyak orang sudah merasa butuh. Karena selama ini market komoditi umumnya secara bilateral, sedangkan dengan sistem online, marketnya menjadi multilateral,” jelas Dean Novel. ▲



Agenda Foto



Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya menjadi narasumber pada Kuliah Umum PBK di FEB, Unpad. Narasumber lain, pelaku industri PBK. Kuliah Umum tersebut dimoderatori Dosen FEB UNPAD, Rachmat Sudarsono. Bandung, 28 April 2012.



Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya diwawancarai reporter Metro TV terkait perkembangan perdagangan berjangka nasional. Jakarta, 26 April 2012.



Sekretaris Bappebti, Nizarli membuka Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka angkatan ke II Tahun 2012. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan kepada para pelaku usaha dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Semarang, 27-28 April 2012.



Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya memimpin Rapat Koordinasi guna membahas pengembangan transaksi INATIN agar menjadi Price Reference. Rapat Koordinasi ini juga membahas kebijakan perpajakan di perdagangan timah. Jakarta, 5 April 2012.



Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya, Direksi BKDI, ISI, dan Direksi PT. Timah (persero) mengunjungi laboratorium dan pabrik pengolahan timah dari PT. Timah. Bangka, 3 April 2012.



Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya dan Bupati Kab. Lamongan Fadeli, diskusi tentang peluang SRG di Lamongan. Dalam kesempatan itu juga dilakukan sosialisasi bagi pelaku SRG dan mengunjungi gudang SRG. Lamongan, Jatim, 19 April 2012.

Bank Dunia 'Intip' PBK Indonesia

Bank Dunia menaruh perhatian terhadap perkembangan industri perdagangan berjangka di Indonesia. Dalam kaitan itu, Bank Dunia mengirimkan dua delegasinya ke Bappebti pada 19 April 2012, yakni The Fei Ming sebagai Private Sector Specialist East Asia and Pacific Region dan Kiyoshi Taniguchi, sebagai economist. Kedatangan delegasi Bank Dunia itu diterima Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Robert J. Bintaryo dan Kepala Biro Analisis Pasar, Bappebti, Chrisnawan Triwahyuardhianto, serta sejumlah staf Bappebti.

"Kita menyambut baik kedatangan delegasi Bank Dunia itu. Artinya, mereka pun melihat pentingnya instrumen perdagangan berjangka bagi Indonesia sebagai negara besar yang memiliki sejumlah komoditi dunia," jelas Robert J. Bintaryo.

Dalam diskusi itu, terungkap se-

jumlah maksud dan tujuan Bank Dunia mengunjungi Bappebti, tambah Robert. Diantaranya, mereka berkehendak dilakukan berbagai kajian terhadap sejumlah komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

"Selain itu, mereka pun mau melakukan kajian dari berbagai kebijakan yang dapat mengembangkan industri perdagangan berjangka di dalam negeri. Termasuk kajian kebijakan terkait perdagangan over the counter (OTC), atau pun sistem perdagangan alternatif (SPA)," kata Robert.

"Tetapi tentunya keinginan Bank Dunia itu harus dibicarakan lebih lanjut dengan pimpinan- Menteri Perdagangan. Karena hal itu menyangkut kerjasama antar lembaga dan juga kebijakan Kementerian Perdagangan," papar Robert J. Bintaryo. ▲



ISI Fasilitas Serah Fisik OLEINTR 660 Ton

PT Identrust Security International (ISI) lembaga kliring Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), pada bulan Maret 2012 melaksanakan tugasnya serah fisik OLEINTR sebanyak 66 lot atau sekitar 660.000 kg, setara 660 ton. Serah fisik Olein itu terjadi dalam dua tahap sepanjang bulan Maret 2012. Periode pertama dilaksanakan pada 12 Maret 2012 sebanyak 44 lot dengan harga penyelesaian sebesar Rp 9.045 per kg. Olein sebanyak 44 lot itu berasal dari dua investor yang bertransaksi me-

lalui PT Optima Capital Futures (OCF).

Dalam transaksi Olein tersebut, salah satu investor OCF bertransaksi sebesar 40 lot, sedangkan sisanya sebanyak 4 lot dari investor lainnya. Serah fisik Olein untuk 40 lot dilakukan di gudang PT Wilmar Nabati Indonesia, yang berada di Tanjung Priok, Jakarta. Sedangkan 4 lot sisanya serah fisik dilakukan di PT Darmex Oil & Fats, Bekasi.

Serah fisik OLEINTR tahap kedua dilaksanakan pada 15 Maret 2012, sebanyak 22 lot. Transaksi OLEINTR sebanyak 22 lot itu berasal dari salah

satu investor yang bertransaksi melalui PT Sinar Mas Futures. Transaksi Olein sebesar 22 lot itu setara 220.000 kg, berada pada harga sebesar Rp 9.235 per kg. Sedangkan serah fisik dilaksanakan di gudang PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, Tanjung Priok, Jakarta.

"Industri perdagangan berjangka nasional sudah semakin berkembang. Hal itu dapat dilihat dari total nilai transaksi. Tahun 2009 volume transaksi mencapai sekitar 4,6 juta lot, 2010 mencapai 5,6 juta lot, dan tahun 2011 mencapai 8,4 juta lot," jelas Ismadjaja. ▲

SEF 'Janji' Transaksi Multilateral

Kehadiran PT.Starpeak Equity Futures (SEF) diharapkan akan menambah semaraknya kegiatan perdagangan berjangka. Hal itu disampaikan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti Ismadjaja Toengkagie, dalam acara grand opening PT. Starpeak Equity Futures yang bertempat di Menara Palma, Jakarta, 28 April 2012. SEF merupakan peralihan dari PT Golden Financial futures. Acara tersebut antara lain dihadiri Direktur Jakarta Futures Exchaneg (JFX) Roy Sembel, Direktur PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Tris Sudarto, dan Direktur PT Identrust Security International (ISI), Nursalam

“Kabar gembira industri ini kedatangan anggota baru, yaitu PT Starpeak Equity Futures. Selaku otoritas pengawas dan pembina perdagangan berjangka tentunya kami berharap Starpeak dapat meningkatkan volume transaksi khususnya pada perdagangan multilateral. Karena hingga akhir tahun 2011 volume transaksi multilateral baru sekitar 2 % dari total 8,4 juta ton,” ujar Ismadjaja.

Dikatakan Ismadjaja, Oleh karena itu, dengan adanya penambahan pialang, tentu akan menambah volume transaksi kontrak berjangka komoditas primer yang nantinya akan diperdagangkan di bursa. “Sehingga kita mempunyai referensi harga, karena kita memiliki komoditi-komoditi unggulan yang masuk 3 besar untuk dunia, yaitu

kopi, karet, dan kakao,” katanya.

Direktur Utama PT. Starpeak Equity Futures, Stenly Marcus Pamikiran, mengatakan, perusahaan tersebut akan bekerja maksimal mengembangkan perdagangan berjangka baik multilateral maupun perdagangan bilateral.

“Kami akan fokus pada perdagangan multilateral, dengan perdagangan yang sudah on-line kontrak berjangka kakao dan emas menjadi sasaran kami,” janji Stenly.

Di sisi lain, Roy Sembel mengulurkan tangan untuk membantu SEF dalam pelatihan perdagangan multilateral. “ Kami akan mendukung SEF dari berbagai segi, seperti pelatihan para karyawannya, sosialisasi, dan lainnya,” tegasnya. ▲

Dana Jaminan JFX Rp 300 Miliar

Jakarta Futures Exchange (JFX) hingga akhir tahun 2011, lalu, mencatatkan nilai dana jaminan nasabah sekitar Rp 300 miliar. Dana jaminan nasabah itu terkumpul dari perusahaan pialang berjangka anggota JFX sejak bursa ini beroperasi. Dana tersebut digunakan sebagai dana talangan kerugian nasabah akibat cedera janji perusahaan pialang berjangka.

Demikian antara lain diutarakan Direktur JFX, Roy Sembel, ditengah-tengah diskusi internal Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Perdagangan (BP2KP) tentang perdagangan berjangka komoditi pada 11 April 2012. Dalam kesempatan itu, Roy Sembel memaparkan Prospek JFX dan Strategi Melejitkan Bursa Komoditi Menjadi Global Player. Diskusi internal itu dibuka

Kepala BP2KP, Bachrul Chairul dan dimoderatori Sekretaris BP2KP, Arief Adang.

“Sejak kami JFX beroperasi, hingga akhir 2011 sudah terkumpul dana jaminan nasabah sekitar Rp 300 miliar. Besarnya nilai dana jaminan nasabah tersebut sudah termasuk akumulasi bunga bank. Karena dana itu disimpan pada rekening tertentu dari bursa berjangka,” ungkap Roy.

Lebih jauh dijelaskan Roy, dana jaminan nasabah itu hanya digunakan pada saat-saat tertentu. Dan, penggunaan dana itu diputuskan berdasarkan rapat Komite Dana Jaminan Nasabah.

“Dari catatan yang saya peroleh, diketahui dana jaminan itu baru satu kali digunakan yakni sebesar Rp 100 juta untuk nasabah yang dirugikan PT Discovery Futures,” kata Roy Sembel. ▲



Harga Kopi Bengkulu Stabil, Kakao Turun

Harga komoditi biji kopi asalan pada tingkat pedagang di Kota Bengkulu, masih bertahan pada posisi Rp 16.000 per kilogram. Hal itu dikatakan Edy Kasim, salah seorang pedagang hasil bumi di Bengkulu. Penyebab stabilnya harga, karena stok cukup terutama pada tingkat pedagang pengumpul baik di Kota Bengkulu maupun di sentra kopi Kabupaten Kepahiang.

“Sedangkan harga biji kakao (coklat) pada tingkat pedagang pengumpul di Kota Bengkulu turun tipis yaitu menjadi Rp 15.000 dari sebelumnya Rp 15.500 per kilogram,” tambahnya.

Diperkirakan, stok biji kopi yang ada sebagian besar produksi awal panen raya 2012. Namun, puncak panen raya secara besar-besaran di perkiraan bulan Juni tahun ini. Sentra produksi di Kabupaten Kepahiang masih menjadi pemasok terbesar. Untuk stok yang ada pada tingkat petani, masih menunggu

harga yang lebih tinggi untuk di jual ke pasaran.

Seperti di ketahui, Kopi asal Bengkulu, biasanya diekspor ke negara Singapura, Malaysia, Hong Kong dan China. Untuk potensi kopi di Bengkulu, tercatat produksinya mencapai 60.790,08 ton per tahun, dengan luasnya mencapai 124.510 hektare yang tersebar di beberapa kabupaten. Sementara itu, produksi kakaonya mencapai 1.822,60 ton per tahun, dengan luas perkebunan mencapai 8.047 hektare. ▲

Produksi dan Konsumsi Karet Seimbang

Kelompok Studi karet Internasional (IRSG) memprediksi tahun 2012 pasar karet akan mencapai keseimbangan. Alasannya, karena pertumbuhan ekonomi global melambat, sehingga memotong permintaan bahan baku yang digunakan dalam ban dan sarung tangan.

“Konsumsi dapat tumbuh 3,4 % menjadi 11,3 juta ton, karena perlambatan pertumbuhan di China. Di sisi lain, produksi akan naik 3,2 % menjadi 11,3 juta ton,” jelas Ekonom senior IRSG Lekshmi Nair.

Menurutnya, hal ini mencerminkan penilaian pada kesehatan ekonomi global memasuki 2012 dan meningkat

ke 2013. Produksi akan naik menjadi 11,9 juta ton pada 2013, sementara permintaan diperkirakan akan naik menjadi 11,8 juta ton.

Di sisi lain, dengan melemahnya permintaan dapat membatasi kenaikan harga, sehingga berpotensi memotong biaya untuk perusahaan produsen ban terbesar, seperti Bridgestone Corp, Michelin & Cie dan Goodyear Tire & Rubber Co.

Sementara itu, harga karet berjangka telah maju 17 % tahun ini setelah kemerosotan 36 % tahun lalu. Proyeksi IRSG terbaru berdasarkan estimasi pertumbuhan global 3,3 % oleh Dana Moneter Internasional. Kemudian Pada 17 April, IMF menaikkan estimasi menjadi 3,5 %.

“IMF memprediksi pertumbuhan 8,2 % untuk China, di mana para pembuat kebijakan bulan lalu memotong target 2012 menjadi 7,5 % terendah sejak 2004. China adalah konsumen terbesar di dunia untuk komoditi karet,” kata Nair.

Lebih lanjut, Nair mengatakan, IRSG akan merilis revisi perkiraan pada Juni, dengan mempertimbangkan proyeksi IMF pada April 2012. Untuk bulan Desember, IRSG memproyeksikan permintaan bakal naik 4,6 % menjadi 11,49 juta ton tahun ini, dan produksi naik 5,1 % ke 11,42 juta ton, menyebabkan kekurangan pasokan 77.000 ton. ▲

PT. Timah Optimis Produksi Naik 10-15 %

PT Timah (Persero) berkomitmen dengan menargetkan produksi timah sebesar 40-45 ribu ton. Angka ini naik 10-15 % dibandingkan angka produksinya di 2011 sebesar 30 ribu. “Tahun ini, produksi ditargetkan mencapai 40-45 ribu ton. Dengan produksi sebesar itu, sekitar 90-95 % biasanya di ekspor. Bukan karena kita tidak mau mengolah, tetapi karena serapan industri dalam negeri rendah,” ujar Dirut

Timah Sukrisno kepada para wartawan, beberapa saat lalu.

Menurutnya, dalam Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan tahun ini, diupayakan ada kenaikan secara konsolidasi sebesar 10-15 %. Di tahun 2011, PT Timah sempat mengalami penurunan laba bersih, yaitu Rp 896 miliar dari sebelumnya Rp 947,9 miliar. Hal ini, karena ketidakstabilan harga timah dunia, baik secara laba, produksi dan volume produksinya.

Mengenai prediksi harga timah ta-

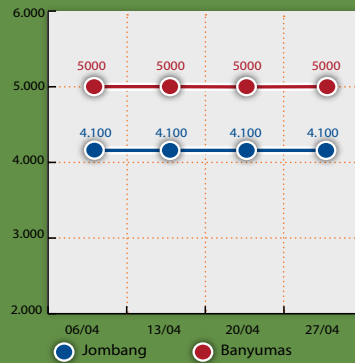
hun ini, Sekretaris Perusahaan Timah, Abrun Abubakar, mengaku tidak bisa memperkirakannya. Hal tersebut, lantaran harga timah tidak hanya dipengaruhi supply timah saja tetapi juga spekulasi.

“Terkadang timah tidak langsung digunakan di enduser tapi disimpan dulu biar harganya naik. Biasanya di kuartal I harga timah agak rendah, naik di kuartal II dan ke III dan kemudian menurun lagi di kuartal IV,” jelas Abrun Abubakar. ▲

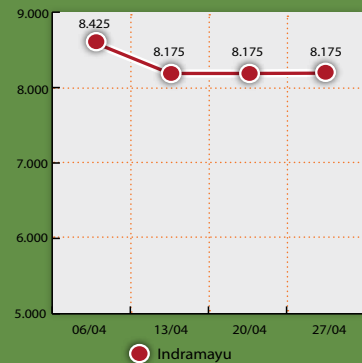


Harga Komoditi (Rp/Kg)

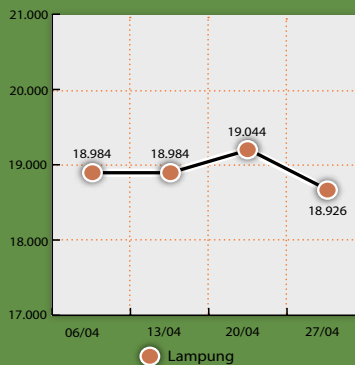
Gabah IR64



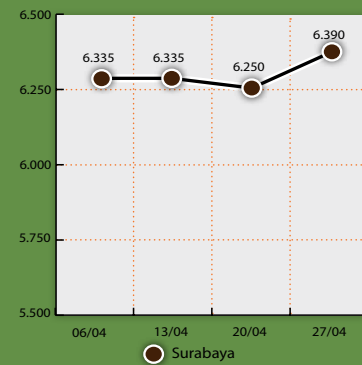
Beras IR64



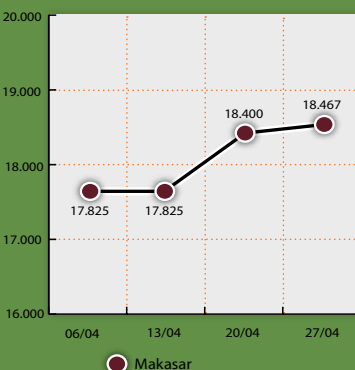
Kopi



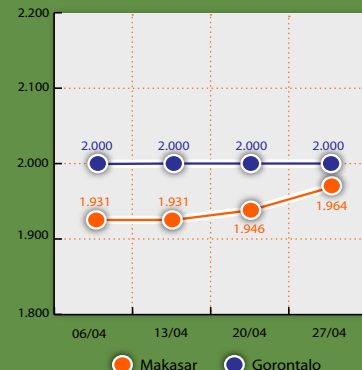
Kedelai



Kakao



Jagung Basah





Minyak Nabati 'Kopra'

Tetap Eksis Meski Digerus Minyak Sawit

Penggunaan minyak kelapa sudah sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari. Dari proses pembuatannya, umumnya minyak kelapa terbagi ke dalam dua kategori yaitu, minyak kelapa murni atau *virgin coconut oil* (VCO) dan minyak kelapa biasa atau *refined bleached and deodorized Oil* (RBD Oil).

Minyak kelapa murni (VCO) diekstrak dari daging kelapa segar dan diproses dengan perlakuan mekanis dan panas yang minimal. Cara ini dimaksudkan untuk mempertahankan struktur bahan kimia tanaman yang terjadi secara alami. Sedangkan minyak kelapa biasa (RBD Oil) diekstrak dari daging kelapa yang telah dikeringkan (kopra). Kelebihan dari VCO dibandingkan dari RBD Oil yaitu, minyak yang dihasilkan memiliki kadar air dan asam lemak bebas yang rendah, bewarna bening dan berbau harum, serta daya simpan minyak lama dapat lebih lama.

Minyak kelapa sebagaimana minyak nabati lainnya merupakan senyawa trigliserida yang tersusun atas berbagai asam lemak, dan 90 % diantaranya merupakan asam lemak jenuh. Selain itu, minyak kelapa yang belum dimurnikan juga mengandung sejumlah kecil komponen bukan lemak seperti fosfatida, gum, sterol (0,06-0,08 %), tokoferol (0,003 %), dan asam lemak bebas (< 5 %) dan sedikit protein dan karoten. Sterol berfungsi sebagai stabilizer dalam minyak dan tokoferol sebagai antioksidan.

Berbicara minyak kelapa, tak lepas dari sumbernya, yaitu pohon kelapa (*cocos nucifera*). Tumbuhan ini, merupakan suku aren-arenan atau arecaceae yang masuk dalam marga

cocos. Hampir semua bagian dari tumbuhan ini yang dapat dimanfaatkan manusia, sehingga dianggap sebagai tumbuhan serba guna.

Hingga saat ini, asal tanaman kelapa masih belum jelas. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kelapa berasal dari bagian utara Pegunungan Andes di Amerika Selatan. Dan, ada pula yang mengatakan bahwa kelapa berasal dari daerah Asia Tenggara. Pendapat lainnya mengatakan, asal kelapa bukanlah dari Benua Amerika, tapi berasal dari salah satu tempat di daerah tropik tua. Indonesia dan Malaysia adalah tempat yang paling mungkin sebagai daerah asal kelapa. Tetapi yang jelas, Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan tanaman kelapa terbesar di dunia.

Menurut data Kementerian Pertanian Tahun 2010, luas areal perkebunan kelapa di Indonesia adalah 3,86 juta hektar. Dari jumlah itu, sebagian besar merupakan kebun milik rakyat dan tersebar di Sumatera sebanyak 32,43 %, Jawa 22,95 %, Sulawesi 19,6 %, Bali, NTB dan NTT 2,93 %, Kalimantan 7,27 %, Maluku dan Papua 9,76 %.

Sedangkan pengolahannya sebagai minyak, sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu oleh jutaan penduduk Asia, Kepulauan Pasifik, Afrika dan Amerika Tengah. Saat itu, minyak kelapa dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat dan kecantikan. Semua itu tercantum dalam kitab Ayurveda, yaitu sebuah kitab kuno yang tertulis dalam bahasa sansekerta di India.

Minyak kelapa konvensional digunakan sebagai minyak makan, sedangkan minyak kelapa murni lebih diutamakan sebagai produk kesehatan dan kosmetika. Di Indonesia, umumnya masyarakat mengenal kopra

sebagai salah satu bahan baku penting dalam pembuatan minyak kelapa.

Menerawang jauh di era 80-an, kopra menjadi bahan baku utama minyak goreng. Saat itu, kontribusi minyak goreng kelapa terhadap produksi minyak goreng nasional masih di atas 50 persen. Namun kini, pertumbuhan produksinya tidak mampu mengimbangi kebutuhan, sebagai akibat tingginya pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pemerintah mengembangkan minyak goreng bersumber kelapa sawit.

Pada hal, berdasarkan riset dan observasi yang telah diterbitkan di berbagai jurnal ilmiah yang dapat dijadikan acuan, saat ini minyak goreng kelapa dapat dimanfaatkan sebagai nutrisi untuk memperlancar metabolisme tubuh, serta meningkatkan ketahanan tubuh. Bahkan *Food and Drug Administration* (FDA), secara eksklusif memasukkan minyak goreng kelapa ke dalam daftar *Generally Regarded As Safe* (GRAS), yang dinyatakan sebagai minyak teraman dan tersehat di dunia.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), pada periode tahun 1981-2008, terjadi penurunan konsumsi kelapa baik dalam bentuk kelapa butiran maupun minyak kelapa. Konsumsi minyak kelapa per kapita juga turun dari 4,00 liter pada tahun 1981 menjadi 2,24 liter pada tahun 2008. Rata-rata penurunan konsumsi minyak kelapa mencapai 3,19 % per tahun. Penurunan konsumsi minyak kelapa ini dimungkinkan dengan berkembangnya kebun kelapa sawit, sehingga produk minyak goreng lebih banyak menggunakan bahan baku dari kelapa sawit. ▲



Kopra Tawarkan Hidup Sehat

Sederet manfaat dapat kita jumpai dari kegunaan minyak kelapa. Umumnya, masyarakat menggunakan sebagai minyak goreng ataupun untuk tujuan pengobatan. Menurut penelitian, dengan mengonsumsi minyak kelapa secara rutin sebagai bagian dari menu makan sehari-hari, bermanfaat membangun imunitas dan bebas dari penyakit kardiovaskuler, kanker dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya.

Tak hanya sebagai minyak goreng, dahulu minyak kelapa murni digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit, seperti demam, menetralkan tubuh yang keracunan dan alergi obat. Setelah beberapa penelitian lebih lanjut para ahli, ternyata manfaat minyak kelapa murni sangat banyak. Diantaranya, mencegah resiko terjerakit kanker, mencegah penuaan dini, peremajaan kulit dan membuat rambut jadi lebih tebal serta hitam, dan banyak manfaat lainnya.

Dr. E.V. Carandang, dalam papernya berjudul "Coconut Uses and Issues on Its Health and Nutraceutical Benefits," menyebutkan, minyak kelapa dapat digolongkan sebagai pangan fungsional atau nutraceutical.

Sedangkan menurut Dr. Bruce Fife penulis buku "The Healing Miracles of coconut oil", minyak kelapa merupakan sumber utama asam lemak rantai sedang atau yang lebih dikenal dengan MCFA (medium chain fatty acid). Sehingga, minyak ini banyak digunakan dalam formula makanan untuk pasien di rumah sakit dan untuk tambahan susu formula untuk bayi.

Tidak seperti asam lemak yang lain, MCFA yang terdapat dalam minyak kelapa sangat mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Selanjutnya digunakan sebagai sumber energi yang paling cepat sehingga sangat membantu proses penyembuhan pasien. Untuk orang-orang yang mempunyai masalah pencernaan contohnya dalam kasus Cystic fibrosis, MCFA diperlukan sebagai nutrisi penting yang perlu ditambahkan langsung dalam diet.

Murray Price, Ph.D dalam bukunya "coconut oil for your health" dan sudah diterjemahkan dengan judul bukunya "terapi minyak kelapa", membahas secara komprehensif tentang manfaat minyak kelapa untuk kesehatan. Menurut Murray, minyak kelapa memang mengandung asam lemak jenuh. Namun, tidak semua lemak jenuh jahat, dan Murray membaginya ke dalam dua kelompok yaitu rantai panjang dan rantai sedang atau pendek. Yang berantai panjang seperti lemak hewani penyebab utama kardiovaskuler.

Sedangkan komponen utama minyak kelapa murni asam lemak rantai sedang. Jenis lemak ini mudah diserap usus karena ukuran molekulnya tidak terlalu besar. Dalam darah, lemak VCO segera masuk ke dalam metabolisme energi, tak ditimbun menjadi kolesterol.

Perawatan Kulit Dengan Minyak Kopra

1. Pelembab Kulit dan Bibir Kering; Minyak kelapa memiliki ukuran partikel yang kecil, yang bisa menembus dengan minyak alami kulit dan

membuatnya lebih mudah meresap. Dengan perawatan yang rutin, minyak ini efektif menjadi pelembab yang baik.

2. Mengobati Penyakit Kulit; Kandungan minyak ini, mampu mengatasi berbagai masalah kulit yang disebabkan infeksi jamur dan bakteri. Selain itu manfaatnya menutrisi kulit agar kembali sehat dan indah.

3. Mengatasi Bau Badan; bau badan identik dengan bakteri dan jamur karena keringat. Dengan pemakaian rutin, minyak ini mampu mengusir bau badan yang tidak sedap.

4. Kerusakan Kulit Akibat Ultraviolet; Oleskan minyak kelapa setelah habis mandi, terutama terutama pada bagian-bagian yang terekspos sinar matahari. Tapi akan lebih baik jika dibantu dengan pemakaian sunblock.

5. Kaki Pecah-pecah; Campurkan minyak kelapa dengan vaseline, kemudian oleskan pada kaki yang pecah-pecah sebelum tidur malam. Jangan lupa untuk membersihkan kaki terlebih dahulu.

6. Eye Make-up Remover; Make-up di bagian mata tidak boleh dibersihkan sembarangan karena kulit di sekitar mata sangat sensitif. Gunakan minyak kelapa dan kapas, kemudian usap perlahan make-up di sekitar mata. Minyak kelapa membersihkan make-up dengan tuntas.

7. Siku dan Lutut Hitam; Kulit putih langsung tercoreng jika siku dan lutut menghitam. Peras air lemon, ambil setengahnya kemudian campurkan dengan 1/2 sdt minyak kelapa. Gosokkan di siku dan lutut yang kering dan menghitam secara rutin ▲



UPP Kemendag Terbitkan Izin WPB & Sertifikat

Terhitung sejak 09 April 2012, Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Kementerian Perdagangan menerbitkan izin Wakil Pialang Berjangka (WPB) dan sertifikat bagi pedagang komoditi primer baik perorangan maupun perusahaan pedagang. Proses penerbitan izin WPB dan sertifikat pedagang tersebut dilakukan secara on-line dan dipastikan selesai dalam tempo dua hari dengan kelengkapan dokumen pendukung. Untuk pemrosesan izin tersebut, pemohon tidak dikenakan biaya tambahan. Tetapi, sesuai dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini telah ditentukan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Kebijakan perizinan perdagangan berjangka komoditi itu tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Bappebti dengan No. 91/Bappebti/Per/03/2012, tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan tertentu di Bidang Perdagangan Berjangka Kepada Unit Pelayanan Perdagangan.

Menurut Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, kebijakan itu diterapkan untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada dunia usaha. "Karena proses itu dilakukan secara on-line, maka berangsur-angsur dihilangkan kebiasaan bertemu dengan pemohon izin. Hal itu untuk menghindari timbulnya biaya-biaya tambahan yang tidak sesuai peraturan."

"Di sisi lain, langkah ini merupakan bagian dari keinginan pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan iklim bisnis dan usaha di Indonesia," jelas Syahrul.

Lebih jauh dijelaskan Syahrul R. Sempurnajaya, UPP Kemendag pada dasarnya hanya menerbitkan izin WPB dan sertifikat pedagang multilateral.

Sedangkan proses seleksi bagi calon WPB dan verifikasi pedagang berjangka tetap dilakukan Bappebti.

"Jadi, UPP itu hanya menerbitkan izinnya saja. Maka di Surat Keputusan itu disebutkan, Kepala Bappebti mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan berjangka komoditi kepada koordinator dan pelaksana UPP."

Cabut Izin

Kabag. Pembinaan Usaha, Bappebti, Himawan Purwadi, di sisi lain mengatakan, proses perizinan WPB dan pemberian sertifikat kepada pedagang multilateral tidak ada berubah dari yang selama ini. "Hanya saja, izin tersebut diterbitkan UPP Kemendag. Di UPP ada juga dua orang tenaga dari Bappebti yang ditugaskan sebagai operator untuk melayani perizinan tersebut."

"Pendaftaran, ujian profesi hingga fit and proper test calon WPB tetap diselenggarakan Bappebti. Tetapi ketika calon WPB mau mengajukan



Calon WPB / Pedagang Multilateral



Pedagang Multilateral

izin WPB dilakukan secara on-line ke UPP Kemendag,” terang Himawan.

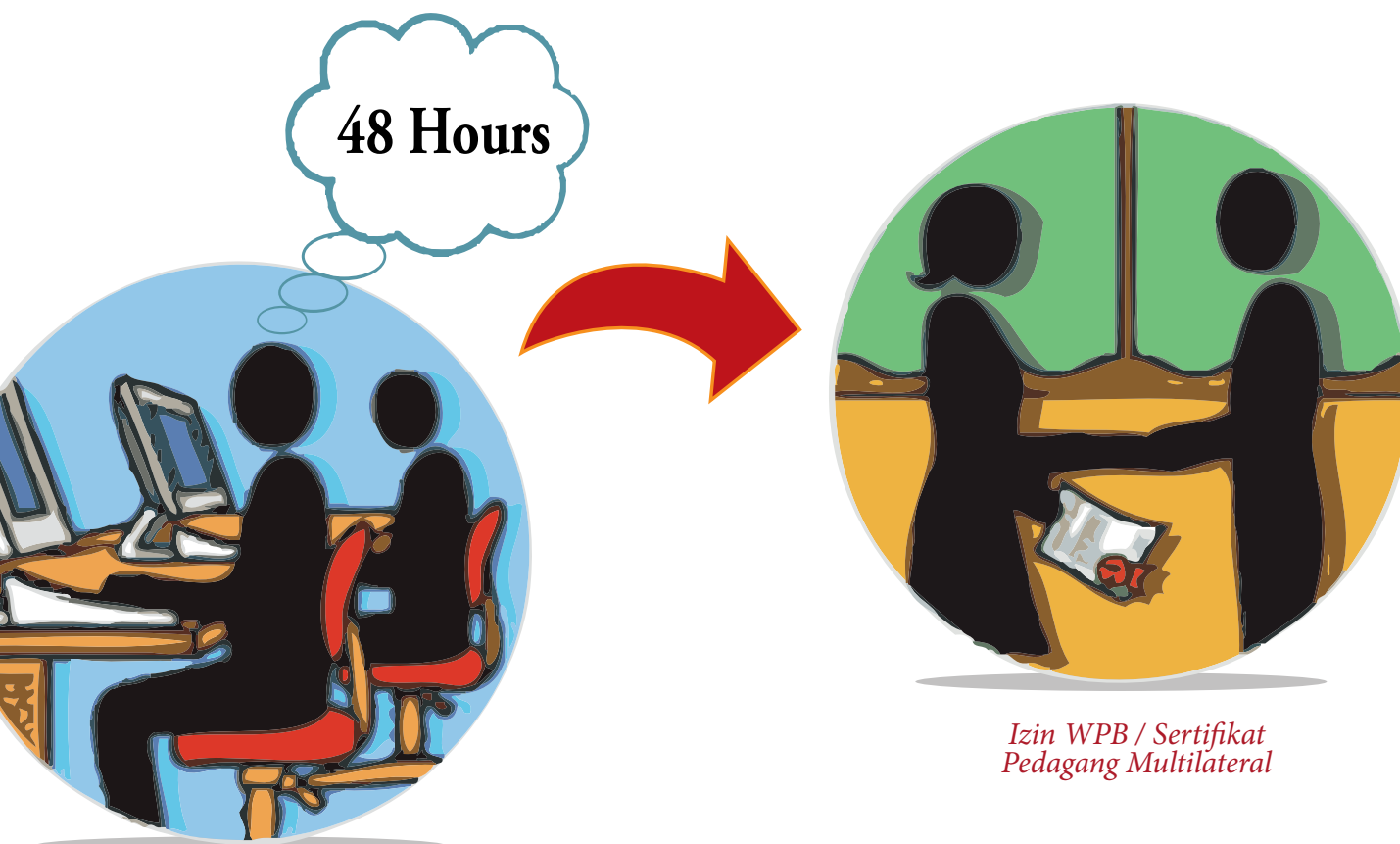
Begitu juga ketika WPB mau pindah perusahaan, terlebih dahulu menyampaikan surat keterangan ke Bappebti lalu mengajukan permohonan secara on-line ke UPP untuk diterbitkan izinnya, tambah Himawan.

“Perlu diketahui, prinsipnya izin WPB dan sertifikat pedagang tersebut tetap saja atas nama Bappebti karena itu amanat Undang-undang No. 10 Tahun 2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hanya saja,

Kepala Bappebti mendelegasikan pada UPP Kemendag dan hal ini pun tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang ada,” paparnya.

“Tetapi wewenang pencabutan izin WPB tetap berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti. Karena perilaku WPB dan kegunaan izin tersebut sesuai peraturan hanya Bappebti yang mengetahui secara teknis. Jadi, pembinaanya tetap ada dibawah kewenangan Bappebti,” tegas Himawan.

Layanan perizinan WPB dan sertifikat pedagang multilateral itu sudah dilaksanakan UPP Kemendag sejak tanggal 09 April 2012. Untuk memohon izin WPB dan sertifikat pedagang dapat diajukan ke alamat UPP Kemendag di Jl. Ridwan Rais No. 5, Gedung Utama Lantai 2, Jakarta 10110, telepon 021- 3858171 (ext. 1027). Sedangkan melalui website www.inatrade.kemendag.go.id, email; inatrade@kemendag.go.id ▲



Dilema Harga Minyak

Anggito Abimanyu

Pada tahun 2009, Meksiko mendapatkan rezeki nom-plok (windfall) sebesar USD 8 miliar dari kontrak lindung nilai (hedging) minyak yang dibelinya pada tahun 2008 sebagai perlindungan terhadap pelemahan permintaan energi dan harga minyak. Saat itu harga minyak menurun dari USD 140 ke USD 50 per barrel sehingga bagi negara dengan status eksportir netto (net exporter), jatuhnya harga minyak tersebut—jika tidak diamankan—akan menyebabkan merosotnya pendapatan negara.

Meksiko melakukan perlindungan pendapatan negara terhadap kemerosotan harga minyak dengan strategi yang tepat dan dapat menghindarkan dari defisit APBN-nya. Dan langkah tersebut diakui sangat tepat dan bermanfaat.

Sebelumnya, tahun 2008, ketika harga minyak dunia meningkat tajam dari USD 70 ke USD 140 per barrel, berbagai cara dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk mengatasi dampak negatif bagi perekonomian. Indonesia tidak terkecuali. Dua kali dilakukan kenaikan harga BBM dalam negeri dan disertai kompensasi kepada rumah tangga sasaran, seperti bantuan langsung tunai (BLT), beras miskin (raskin), jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas).

Meskipun dampaknya buruk bagi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan strategi kompensasi memadai, Indonesia terbebas dari kekhawatiran fiskal dan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2011, ketika harga minyak dunia mulai merangkak naik, negara-negara yang melakukan subsidi terhadap harga BBM dalam negeri, seperti China, India, Malaysia, Thailand, dan Afrika Selatan serta beberapa negara Timur Tengah, sudah merencanakan kenaikan harga BBM. Beberapa negara yang memiliki sumber daya energi telah juga menggunakan dana cadangan minyak untuk menambah subsidi BBM dengan tujuan melindungi daya beli.

Ada juga yang sudah membuat sistem penjabatan konsumsi BBM dengan target subsidi kepada pengguna tertentu. Sementara itu, beberapa negara yang memberlakukan penyesuaian harga BBM pada tingkat harga keekonomi-

mian secara otomatis telah mengurangi beban pajak atau cukai atas konsumen BBM.

Banyak juga negara maju khususnya sangat giat melakukan diversifikasi energi dari BBM ke sumber lain yang lebih murah dan ramah lingkungan, seperti gas dan elpiji. Saat ini Indonesia belum melakukan upaya signifikan untuk mengendalikan dampak kenaikan harga minyak dunia. Meskipun telah diberikan mandat untuk melakukan penghematan konsumsi dan penyesuaian harga BBM dalam keadaan kenaikan harga 10 persen di atas asumsi harga minyak di dalam APBN 2011, desain kebijakannya masih terus saja diperdebatkan.



Importir netto

Dalam sepuluh tahun terakhir, fluktuasi naik turunnya harga minyak dunia adalah suatu fenomena yang lazim terjadi. Di samping karena masalah kebutuhan melampaui jumlah ketersediaan, faktor konflik Timur Tengah juga menjadi alasan hambatan pasokan atau menjadi sasaran spekulasi. Namun, yang tak kalah pentingnya adalah terjadinya reorientasi para pelaku pasar modal yang mengalihkan investasi bursa keuangan ke bursa komoditas atau yang lazim disebut flight to commodity.

Situasi gejolak di pasar keuangan juga menjadi alasan yang kuat harga komoditas baik spot maupun future bergejolak dengan motivasi untuk mengambil keuntungan (profit taking) atau melindungi investor dari kerugian yang lebih besar di pasar keuangan. Maka, negara konsumen maupun penghasil sumber daya energi harus terus berputar otak dan menggunakan cara-cara untuk

dapat melindungi gejolak perekonomiannya. Dan karena ada unsur ketidakpastian, bisa saja respons kebijakan yang dilakukan melenceng.

Akan tetapi, bagaimanapun, upaya harus tetap dilakukan karena jika tidak melakukan tindakan apa-apa, biaya ekonomi yang harus dibayar akan lebih mahal daripada melakukan sesuatu meskipun terdapat risiko kesalahan antisipasi.

Situasi perminyakan di Indonesia sudah terbalik dari sepuluh tahun yang lalu. Indonesia dikategorikan sebagai importir netto minyak sehingga yang menjadi risiko ekonomi dan fiskal adalah apabila harga minyak dunia naik akan merugikan perekonomian dan APBN. Sejak itu, setiap harga minyak naik selalu menjadi sandera bagi perekonomian Indonesia.

Berbagai upaya sudah dilakukan, seperti upaya peningkatan produksi minyak, konversi BBM dengan elpiji, penggunaan non-BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik, dan lain-lain. Namun, semua kebijakan tersebut belum cukup untuk menghindarkan Indonesia dari status importir netto minyak.

Strategi hedging- lindung nilai juga sempat mencuat beberapa tahun yang lalu, tetapi sistem penganggaran belum memungkinkan kita mengakomodasikan transaksi yang mengandung risiko kerugian tersebut dilakukan.

APBN kita saat ini masih rentan terhadap volatilitas harga komoditas, khususnya minyak. Indonesia melakukan impor minyak dalam jumlah yang signifikan untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri dan harga minyak tersebut disubsidi.

Pada batas tertentu, volatilitas harga minyak tersebut masih bisa ditanggung oleh APBN. Namun, ada keterbatasan kemampuan APBN untuk menanggung kenaikan harga minyak tersebut. Sementara, terdapat keterbatasan untuk dilakukan pass through selisih harga minyak kepada konsumen. Hal ini berisiko mengganggu kondisi APBN.

Dengan harga di atas USD 110 per barrel akhir-akhir ini, hal itu tentu sudah mengganggu APBN. Meski pendapatan negara dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) atas migas bertambah, tetapi subsidi energi, bagi hasil minyak, dan konsekuensinya pada



“Strategi hedging- lindung nilai juga sempat mencuat beberapa tahun yang lalu, tetapi sistem penganggaran belum memungkinkan kita mengakomodasikan transaksi yang mengandung risiko kerugian tersebut dilakukan.”

anggaran pendidikan bertambah lebih banyak.

Akibatnya, setiap kenaikan rata-rata per tahun harga minyak USD 1, APBN tekor sekitar Rp 700 miliar. Jadi, jika harga minyak dunia mengalami kenaikan sepanjang tahun sebesar USD 10 di atas rata-rata asumsi APBN, yakni USD 80 per barrel, akan terjadi ketekoran Rp 7 triliun.

Ini belum termasuk apabila konsumsi BBM bersubsidi melebihi kuota serta dibatalkannya kebijakan pembebasan batas tarif (capping) listrik PLN serta penurunan produksi minyak kita.

Hasil Tim Kajian BBM

Pemerintah sendiri belum menentukan sikap. Tim Kajian Pengaturan BBM dari konsorsium peneliti tiga perguruan tinggi Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Indonesia (UI) sudah menyampaikan hasil dan rekomendasi dari ketiga opsi yang diajukan minggu lalu. Opsi yang direkomendasikan saat ini belum dapat dipublikasikan ke media sambil menunggu pembahasan dengan DPR.

Untuk diketahui, tim tidak hanya menyampaikan opsi, tetapi juga kemuakhiran metodologi, manfaat dan biaya dari opsi-opsi tersebut, serta urutan pelaksanaan kebijakan. Ada rekomendasi yang sifatnya segera (1-2 bulan) dan jangka menengah (6 bulan). Kalau rekomendasi tersebut dipertimbangkan, niscaya sebagian masalah subsidi BBM dapat dipecahkan.

Tim memberikan rekomendasi atas dasar berbagai macam pertimbangan, yakni ekonomi, politik, sosial, dan teknis perminyakan dan dengan diskusi pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan di pusat dan daerah secara mendalam, serta dengan pengumpulan data lapangan yang cukup akurat. Waktu yang diberikan untuk penelitian ini sebetulnya sangat tidak memadai, yakni hanya dua bulan efektif.

Pemerintah sejak awal sudah mengatakan tidak akan menaikkan harga

BBM meskipun tetap menunggu pembahasan dengan DPR. “Kami akan membahas dengan DPR terlebih dahulu mengenai opsi kebijakan pengaturan BBM bersubsidi,” kata Menteri ESDM.

Tim tetap berpendapat kenaikan harga BBM untuk kendaraan pribadi dengan pengembalian subsidi (cash-back) kepada angkutan umum, seperti pendapat Kepala BPS minggu lalu, adalah kebijakan yang masuk akal. Angkutan umum tetap perlu disubsidi karena mereka melakukan pelayanan masyarakat dan tarifnya diatur oleh pemerintah.

Tanpa penyesuaian harga untuk kendaraan pribadi, maka akan terjadi disparitas harga yang melebar, berakibat pada konsumsi yang membengkak dan migrasi dari konsumen pengguna pertamax ke premium. Pertimbangan-pertimbangan sosial, konflik, daya beli, risiko demonstrasi dan politik tetap menjadi bahan tim dalam memberikan rekomendasi.

Ide penghematan dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi bukan hal yang baru. Zaman pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I pernah dilontarkan gagasan penggunaan kartu pintar (smart card), klusterisasi, pengawasan distribusi, dan kampanye hemat BBM.

Waktu itu dirasa persiapannya sangat minim sehingga urung dilakukan. Menko Perekonomian Hatta Rajasa pada akhir tahun 2010 menyampaikan nada optimistis bahwa kebijakan penghematan konsumsi BBM ini akan mulai dilaksanakan 2011.

Asal tahu saja, jika tidak dilakukan kebijakan apa pun, maka alokasi BBM subsidi tahun ini sebanyak 38,5 juta kiloliter dan diperkirakan akan bertambah setidaknya 2 juta kiloliter. Tahun 2010 realisasi konsumsi BBM telah berada di atas perhitungan awal yang berarti menambah anggaran subsidi. Menteri Keuangan Agus Martowardojo buru-buru memberikan peringatan untuk tetap mempertahankan konsumsi 38,5 juta kiloliter.

Jika tidak, maka kenaikan anggaran subsidi BBM akan menambah defisit anggaran. Meskipun terdapat penghematan dari nilai tukar yang berada di bawah asumsi, tetap saja tidak mampu mengatasi pembengkakan defisit.

Maka, sebaiknya pemerintah mengambil tindakan untuk mengamankan perekonomian kita, tidak menambah defisit APBN, meskipun dengan kebijakan sesulit apa pun, demi keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang.

Ancaman inflasi memang nyata. BI dan BPS sudah memberikan peringatan akan dampak kebijakan pengaturan BBM pada inflasi di tahun 2011. Bagaimanapun kenaikan inflasi akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan daya beli. Perhitungan tim menunjukkan bahwa dampak inflasi lebih kecil daripada manfaat fiskal dan perekonomian secara keseluruhan yang dihasilkan.

Memang terkesan hasil kajian mengenai pengaturan BBM begitu njelimet dan rumit. Pada waktunya akan dapat dipaparkan secara gamblang dan jelas duduk soalnya dari A sampai Z. Namun, setelah kajian dipaparkan, pada akhirnya terpulang pada pemerintah dan DPR sebagai otoritas pengambil keputusan.

Menurut tim kajian, persoalan BBM tahun 2011 lebih sederhana dibandingkan dengan persoalan serupa pada tahun 2008, tetapi kalau ragu dan terlambat mengantisipasi, dampaknya akan lebih besar dan berpotensi dapat merugikan perekonomian nasional.

Kita tidak pernah tahu sampai kapan dan seberapa serius masalah kenaikan harga minyak dunia dari krisis Timur Tengah. Apa pun yang terjadi dengan kenaikan harga minyak dan pasokan minyak dunia, kita harus mempersiapkan diri dengan kebijakan dan tindakan yang tepat, cepat dan pasti. Dosen FEB-UGM, (Kompas.com) ▲



ICDX works hand in hand with Bloomberg for Investor Transaction Efficiency

Recently Indonesian Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) announced that they implement Bloomberg's Global Identifiers (BBGID) and support Bloomberg's Open Symbolology (BSYM) to promote transparency and lower data management costs for their customers.

ICDX will distribute BSYM through the data feeds and web sites to ensure optimum availability and access towards its global customer base.

The program will allow market participants to experience the benefit of choice flexibility and relieve them of the mapping burden between global and local security identifiers.

"Adopting Bloomberg's Open Symbolology will decrease the operational costs and also improve data transparency," Megain Widjaja, Chief Executive Officer of ICDX said.

"These factors could drive market growth by reducing barriers to entry and building confidence in the efficiency of the Indonesian commodities markets."

"Now a days market participants often have to register several proprietary symbolologies to manage trading operations in multiple markets, across asset classes and financial instruments," Peter Warms, head of Bloomberg's Open Symbolology group said.

"BYSM was launched as a respond of market demand for open systems and symbolology, and its ongoing adoption reflects the industry's focus on publishing transparency and lowering data management costs."

Bloomberg's Global Identifier, BBGID, is a 12-digit alphanumeric identifier that covers more than 75 million active and inactive securities in global.

No license fees and standard symbolology is used across all global asset classes. For more information on Bloomberg's Open Symbolology, please visit www.openbloomberg.com/open-symbolology/. ▲

Hedging discourse on import oil rate

Government has planned for import oil rate hedging on Country Expend Revenue Budget 2013. The aim is to protect the budget from the impact of world oil price increase because currently Indonesia is included as oil importer country. This policy was believed to be able to press the risk of world oil price fluctuation.

"By this oil hedging, oil price will be more controllable so that government can purchase oil with certain price and quality," Agus Martowardojo, The Monetary Minister said at DPR RI building last March.

According to him hedging will not be different with insurance therefore deep review is needed in Country Expend Revenue Budget 2013.

In another side The chief of Fiscal Policy Agency, Monetary Ministry, Bambang Brojonegoro said that the policy need to be carefully considered as there will be impact and charges that need to be considered.

Referring to Bambang, consideration with law review is needed. "We do have experience in the past when Monetary Editing Agency had difficulty to audit country finance. The most important thing that this has to be legal so there will be no opposition," Bambang Brojonegoro explained. ▲

Even in crisis, export still growth 7.6%

The effect of global economic crisis has been came up. The Trade vice minister, Bayu Krisnamurthi, admitted that this year export growth was slowing down compare than last year export growth that reached 29.1%.

However export performance on the two first month period in 2012 was still in good condition with export strength increased 8.5% to USD 15.6 billion compared with the same period last year.

"It indicates that global crisis started impacting Indonesian export performance, this condition also happened in China, North Korea, Japan and Brazil," Bayu Krisnamurthi said in Export Import Press Performance Conference 2012, on Monday (2/4), at Trading Ministry Auditorium.

Export strength until last February was driven by oil export that increased 26.4% to USD 3.3 billion dan Non oil export in 4.6%

to USD 12.3 billion.

In accumulation, January-February 2012 export reached USD 31.2 billion or increased 7.6% compared with the same period last year

"Indonesian trading Scale in February experienced surplus USD 0.7 billion consists of non oil trading scale surplus USD 0.9 billion and oil trading scale deficit USD 0.2 billion," Bayu explained.

Bayu also said that in comparison with other country, Indonesian export growth is still quite big, which grown and increased 7.6%. China experienced export decrease from 21.3% to 6.9%, North Korea from 30.5% to 5.6%, Japan from 15.5% to 0.03% dan Brazil from 35.9% to 7.0%.

However, Bayu said that we need applicable tactics to anticipate the global crisi phenomenon. One of the tactics is to encourage export market diversification program to non-traditional market such as in Africa and America Latin. ▲



Rizal Tua Hutasoit

Dari Lawyer Jadi Broker

‘S iapa yang mau kerja keras, dia pantas mendapatkan posisi teratas. Begitu dituturkan Rizal Tua Hutasoit, Direktur PT Trijaya Pratama Futures (TPF), mengisahkan perjalanan kariernya di industri perdagangan berjangka komoditi nasional. Dan, hal itu pula yang ditanamkan bagi para tenaga marketing yang tergabung di TPF.

“Terbukti kami mampu bersaing di industri ini dan berkembang hingga memiliki enam kantor cabang dan kantor pusat. Jujur kami harus mengakui, perusahaan ini berkembang berkat kerja keras tenaga marketing. Oleh karena itu, jenjang karier di Trijaya sangat jelas dan transparan sejak menjadi tenaga marketing,” kata Rizal.

Direksi Trijaya sangat memperhatikan tenaga marketing yang berprestasi. Dan, bagi yang berprestasi diberi jabatan untuk mengisi kantor-kantor cabang Trijaya. “Kami akui, tenaga marketing di Trijaya dididik dengan keras, sehingga memahami betul bisnis perdagangan berjangka. Selain itu, loyalitas marketing terhadap perusahaan sangat dihargai. Karenanya, perusahaan mendukung semua aktifitas mereka.”

TPF adalah salah satu perusahaan pialang berjangka anggota Jakarta Futures Exchange (JFX) sejak tahun 2004. Di tahun 2009, pialang ini juga menjadi anggota Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). TPF semula berkantor pusat di Medan, Sumut. Namun, sesuai dengan perkembangan perusahaan TPF merambah Jakarta dan kantor yang ada di Kota Medan menjadi salah satu kantor

cabang.

“Jadi, sejak awal berdirinya perusahaan ini, kami sudah menerapkan manajemen terbuka dan kekeluargaan. Berbagi pengalaman selalu dikedepankan. Seorang tenaga marketing yang tidak berkembang, permasalahannya dipecahkan bersama dengan yang sudah berpengalaman. Itu sebabnya, tenaga marketing yang berasal dari Trijaya pasti berhasil di perusahaan lain,” kata pria berdarah Batak ini.

Sebab itu, Trijaya tidak pernah menerima tenaga marketing yang sudah pernah bergabung di perusahaan lain. Karena, salah satu misi kami selain berbisnis juga menciptakan SDM yang profesional di bidang perdagangan berjangka. Itulah membedakan kami dengan perusahaan pialang lainnya.

Ayah dari tiga anak ini menuturkan, membangun loyalitas tenaga marketing tidak hanya diukur dari sisi income yang diperoleh. Tetapi juga kenyamanan mereka bekerja. Karena itu, setiap awal bulan kami menyelenggarakan ibadah persekutuan doa bagi beragama Kristen. Sedangkan yang beragama Islam, di hari raya besar diselenggarakan berbagai kegiatan. “Kegiatan seperti itu selain mengikat rasa kekeluargaan juga memperpendek jarak antar manajemen dengan karyawan.”

“Secara reguler kami juga mengunjungi panti asuhan dan komunitas yang layak dibantu. Dari seluruh karyawan dikumpulkan dana sukarela, lalu disalurkan kepada mereka yang membutuhkan,” papar Rizal.

Alumnus Fak. Hukum Univ. Panca Budi, Medan, 1997 ini, menuturkan, berkecimpung di bidang perdagangan

berjangka diawali perkenalannya dengan salah satu pengurus TPF. “Ketika itu saya masih berprofesi sebagai pengacara. Sejak selesai kuliah, saya bersama sejumlah teman mendirikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Dharma Sena. Dan saya ditunjuk menjadi ketuanya. Tetapi nasib menentukan lain. Malah saya lebih tertarik dengan bisnis ini, hingga kantor pengacara itu saya tinggalkan dan kemudian bubar.”

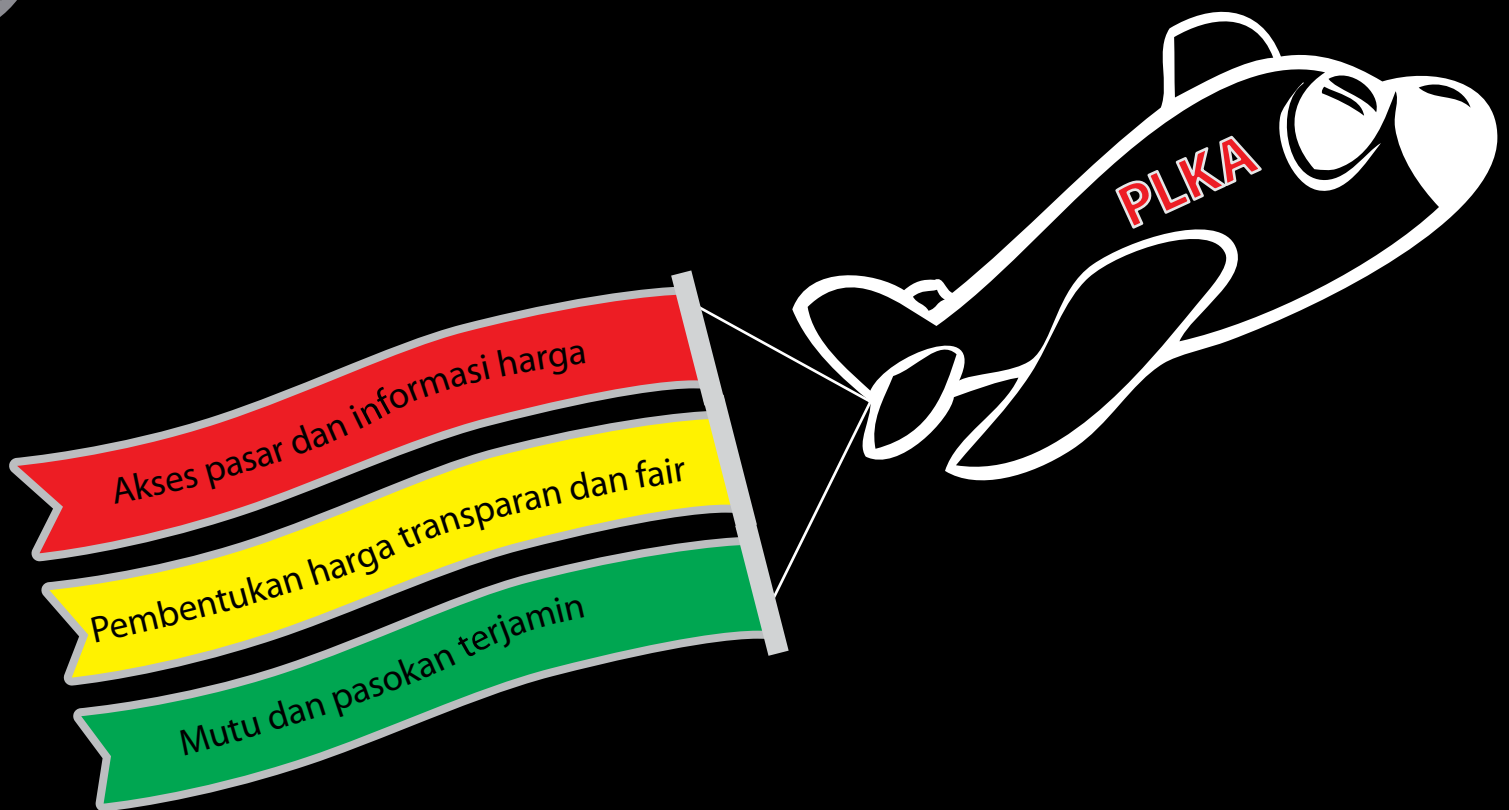
“Anjuran orang tua untuk menjadi PNS di Pemda Medan pun saya tolak. Karena saya menemukan tantangan di bisnis ini. Mungkin itu dikarenakan sejak SMP saya sudah berusaha mencari uang tambahan untuk menambah diri sendiri,” akunya.

Saya sudah rasakan pahit-manisnya sebagai tenaga marketing. Karena dari jenjang marketing-lah saya tergabung di Trijaya hingga saat ini. Tetapi pahitnya sebagai tenaga marketing saat itu, sudah terbayarkan dengan apa yang saya peroleh saat ini, tambahnya.

Menurut Rizal, TPF pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, sekitar 300 %. Sedangkan tahun 2011 lalu, sedikit mengalami penurunan dampak lesuhnya pasar. Untuk tahun 2012, diharapkan TPF bisa mencapai pertumbuhan hingga 300 % seperti tahun 2010 lalu.

“Mencapai prestasi pertumbuhan hingga 300 %, kami sudah siapkan sejumlah strategi. Diantaranya rencana mengembangkan kantor cabang di Wilayah Timur Indonesia. Selain itu, menggenjot transaksi kontrak multilateral baik yang ada di JFX maupun di BKDI,” jelas Rizal Tua Hutasoit. ▲

Manfaat Pasar Lelang Komoditi Agro



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - BAPPEBTI
www.bappebti.go.id